

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN RASIO KEUANGAN BANK

**(Studi pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang
Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Periode 2013 – 2016)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

DUWI HARDIANTI

NIM. 145030201111078



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2018**

MOTTO

“MY SUCCES IS ONLY BY ALLAH”

QUR’AN (11:88)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi Pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 – 2016)

Disusun oleh : Duwi Hardianti

NIM : 145030201111078


Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu AdministrasiBisnis

Konsentrasi/Minat : Keuangan

Malang, 20 April 2018

Komisi Pembimbing



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 195707121985031001

TANDA PENGESAHAN

Telah di pertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Mei 2018

Pukul : 11.00 WIB

Skripsi atas nama : Duwi Hardianti

Judul : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013-2016).

Dan dinyatakan

LULUS

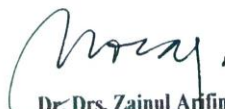
MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



Dr. Drs. Zainul Arifin, MS.
NIP. 19570415 198601 1 001

Anggota



Drs. Achmad Husaini, M.AB
NIP. 19580706 198503 1 004

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 20 April 2018



Duwi Hardianti
145030201111078

RINGKASAN

Duwi Hardianti, 2018, **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank** (Studi Pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 – 2016), Dr. Drs. Muhammad Saifi M.Si, 166 Hal+xiii.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah berdasarkan rasio keuangan bank pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013 – 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 10 Bank Umum Konvensional dan 10 Bank Umum Syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) selama periode 2013 – 2016 yang telah dipublikasikan oleh *website* OJK dan *website* masing-masing bank yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan uji *independent sample t-test*. Rasio yang digunakan pada penelitian ini terdapat rasio *Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio* (LDR/FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (NPL/NPF).

Berdasarkan teknik analisis data yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) dari masing-masing rasio, menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Umum Konvensional berdasarkan LDR/FDR, ROA, ROE, BOPO dan NPL/NPF lebih baik dibandingkan Bank Umum Syariah. Berdasarkan rasio CAR, kinerja keuangan Bank Umum Syariah lebih baik dibandingkan Bank Umum Konvensional. Berdasarkan hasil uji *independent sample t-test*, terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio LDR/FDR, ROA, ROE, dan BOPO, sedangkan pada rasio CAR dan NPL/NPF menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

SUMMARY

Duwi Hardianti, 2018, *An Analysis of Financial Performance Comparison between Conventional Commercial Banks and Islamic Commercial Banks based on Bank Financial Ratio* (Study in Conventional Commercial Banks and Islamic Commercial Banks Listed and Supervised by the Financial Services Authority (OJK) Period 2013-2016), Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si, 166 Page+xiii.

This research attempts to determine the comparison of financial performance of Conventional Banks and Islamic Banks based on financial ratio of Conventional Commercial Banks and Islamic Commercial Banks registered and supervised by the Financial Services Authority (OJK) period 2013-2016. Descriptive research with quantitative approach was used in this research by employing purposive sampling as a sampling method. The sampling consisted of 10 Conventional Commercial Banks and 10 Islamic Commercial Banks.

The data collection techniques used was documentation method toward the process secondary data collection in the form of annual financial statements (annual report) during the period 2013 to 2016 which has been published by OJK website and website of each bank concerned. The analysis techniques used in this research were descriptive statistical analysis and independent sample t-test. The ratio used were the ratio of Loan to Deposit Ratio / Financing to Deposit Ratio (LDR/FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Operational Cost to Operating Income (BOPO), and Non Performing Loan / Non Performing Financing (NPL/NPF).

Based on the data analysis, the results showed that the average means of LDR/FDR, ROA, ROE, BOPO, NPL/NPF ratio of Conventional Commercial Banks were better than Islamic Commercial Banks. On the other hand, the ratio of CAR of Islamic Commercial Banks had better performance than Conventional Commercial Banks did. Further, the results of independent sample t-test showed that there was a significant difference between the financial performance of Conventional Commercial Banks and Islamic Commercial Banks on LDR/FDR, ROA, ROE and BOPO ratio, while in the CAR and NPL/NPF ratio, the Conventional Commercial Banks and Islamic Commercial Banks remained similar.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kasih dan sayang-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi Pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013-2016)” tepat pada waktu yang ditentukan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menerima banyak bimbingan, pengarahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
2. Bapak Mochamad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
3. Ibu Nila Firdausi Nuzula, Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan berlangsung.

6. Kedua orang tua tercinta, kakak, adik, dan keponakan tersayang yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.
7. Para sahabat tersayang sedari awal masuk kuliah, Rizky Fitra, Aqmar, Angel, Aqsha, Deasy, dan Savera yang telah menghiasi hari-hari peneliti selama perkuliahan dan selama hidup di kota perantauan ini serta selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Para teman-teman terdekat peneliti Lita, Kurni, Mega, Agil, Bagus Arief, Wawan, Sigit, Luthfi, Rangga, Galih, Kemas, Chandra, Andi, Isti dan Rahma yang telah menemani hari-hari peneliti selama masa perkuliahan.
9. Para teman-teman dan kakak-kakak Panitia FIA Night Run, Panitia PK2MABA FIA Adiraja, dan Panitia Olimpiade Brawijaya yang telah memberikan banyak pengalaman kepada peneliti.
10. Teman-teman seperjuangan skripsi yang telah memberikan banyak motivasi, saran dan informasi dalam penyusunan skripsi.
11. Teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.

Peneliti menyadari dalam penyajian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Peneliti berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan bagi pembaca umumnya.

Malang, 14 Mei 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II Tinjauan Pustaka	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kinerja Keuangan	20
C. Bank	22
1. Pengertian Bank	22
2. Fungsi Bank	23
3. Jenis-jenis Bank	23
4. Pengertian Bank Konvensional	25
5. Pengertian Bank Syariah	26
6. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah	30
D. Laporan Keuangan	32
1. Pengertian Laporan Keuangan	32
2. Tujuan Laporan Keuangan	34
3. Sifat Laporan Keuangan	35
4. Keterbatasan Laporan Keuangan	36
5. Analisis Laporan Keuangan	37
E. Rasio Keuangan Bank	38
1. Pengertian Rasio Keuangan Bank	39
2. Macam-macam Rasio Keuangan Bank	40
F. Kerangka Pikir	52
G. Hipotesis	52

BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Variabel Penelitian	55
D. Populasi dan Sampel	59
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Gambaran Umum Perusahaan Sampel Penelitian	69
C. Penyajian Data.....	107
D. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	126
E. Uji <i>Independent Sample t-test</i>	133
F. Pembahasan Hasil Penelitian	140
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN	150

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Bank	8
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.2 Perbedaan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.....	31
Tabel 2.3 Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga.....	31
Tabel 3.1 Bank Umum Konvensional yang akan dianalisis	60
Tabel 3.2 Bank Umum Syariah yang akan dianalisis	61
Tabel 4.1 Data LDR Bank Umum Konvensional	107
Tabel 4.2 Data CAR Bank Umum Konvensional	109
Tabel 4.3 Data ROA Bank Umum Konvensional.....	110
Tabel 4.4 Data ROE Bank Umum Konvensional	112
Tabel 4.5 Data BOPO Bank Umum Konvensional.....	114
Tabel 4.6 Data NPL Bank Umum Konvensional.....	115
Tabel 4.7 Data FDR Bank Umum Syariah.....	117
Tabel 4.8 Data CAR Bank Umum Syariah	118
Tabel 4.9 Data ROA Bank Umum Syariah	120
Tabel 4.10 Data ROE Bank Umum Syariah	121
Tabel 4.11 Data BOPO Bank Umum Syariah.....	123
Tabel 4.12 Data NPF Bank Umum Syariah	125
Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Rasio Keuangan	126
Tabel 4.14 Hasil Uji <i>Independent Sample t-test</i>	133
Tabel 4.15 Hasil Uji <i>Independent Sample t-test</i> Rasio LDR/FDR.....	134
Tabel 4.16 Hasil Uji <i>Independent Sample t-test</i> Rasio CAR	135
Tabel 4.17 Hasil Uji <i>Independent Sample t-test</i> Rasio ROA.....	136
Tabel 4.18 Hasil Uji <i>Independent Sample t-test</i> Rasio ROE	137
Tabel 4.19 Hasil Uji <i>Independent Sample t-test</i> Rasio BOPO.....	138
Tabel 4.20 Hasil Uji <i>Independent Sample t-test</i> Rasio NPL/NPF	139

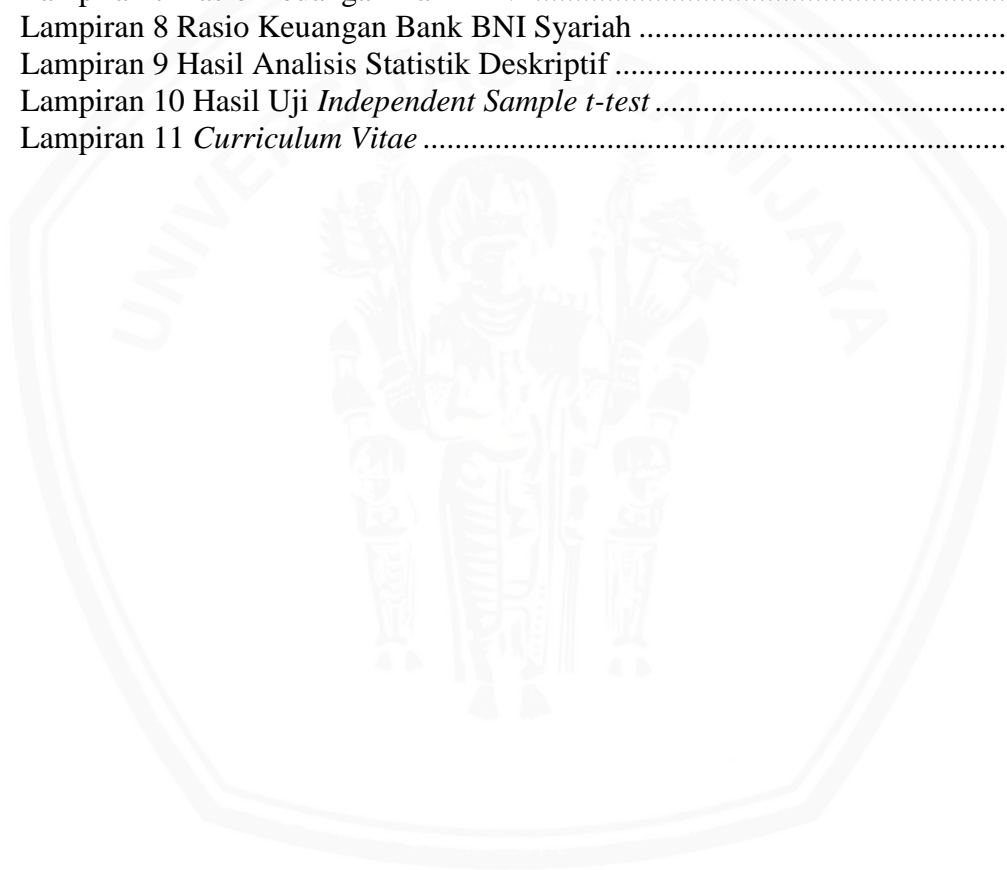
DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Hasil <i>Purposive Sampling</i> Bank Umum Konvensional.....	151
Lampiran 2 Hasil <i>Purposive Sampling</i> Bank Umum Syariah.....	155
Lampiran 3 Data Mentah Bank Umum Konvensional.....	156
Lampiran 4 Data Mentah Bank Umum Syariah.....	158
Lampiran 5 Rasio Keuangan Bank Mandiri	160
Lampiran 6 Rasio Keuangan Bank Syariah Mandiri	161
Lampiran 7 Rasio Keuangan Bank BNI	162
Lampiran 8 Rasio Keuangan Bank BNI Syariah	163
Lampiran 9 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	164
Lampiran 10 Hasil Uji <i>Independent Sample t-test</i>	165
Lampiran 11 <i>Curriculum Vitae</i>	166



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki suatu tujuan atau target yang ingin dicapai. Hal utama yang harus dilakukan agar bisa mencapai tujuannya adalah dengan memperhatikan kinerja pada perusahaan. Menurut Jumingan (2011:239), kinerja perusahaan secara keseluruhan merupakan suatu gambaran prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode yang terdiri dari aspek keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan teknologi. Beberapa aspek yang terdapat pada kinerja perusahaan tersebut, salah satu indikatornya yang penting dan harus selalu dijaga konsistensinya adalah kinerja keuangan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauhmana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2015:149). Kinerja keuangan mampu membantu pihak-pihak perusahaan dalam mengambil keputusan untuk rencana di periode selanjutnya, sehingga pihak perusahaan dapat meminimalisir kesalahan yang pernah terjadi. Sama seperti pada perusahaan pada umumnya, bank juga perlu memperhatikan kinerja keuangannya agar bank tersebut mampu bertahan di industri perbankan.

Perkembangan perbankan dalam negeri di era perekonomian modern ini sudah berkembang dengan pesat. Hal tersebut ditandai dengan mulai banyaknya

bank yang menawarkan jasa dan layanan yang mampu mempermudah aktivitas masyarakat. Persaingan antar bank semakin ketat, maka dari itu masing-masing bank berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengoptimalkan penggunaan dana-dana yang ada serta menggunakan teknologi yang dimiliki agar dapat mewujudkan target perusahaan sehingga hal tersebut mampu meningkatkan daya saing perusahaan.

Bank merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman (Ismail, 2011:30). Kepercayaan adalah salah satu kunci utama yang dibutuhkan bank dari masyarakat atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Bank membutuhkan kepercayaan dari masyarakat karena sumber utama dana bank diperoleh dari masyarakat. Agar bank mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, bank harus terus meningkatkan kinerjanya salah satunya adalah kinerja keuangannya. Pada dasarnya masyarakat akan lebih memilih menggunakan jasa atau layanan bank yang memiliki kinerja yang baik, karena menurut masyarakat bank yang memiliki kinerja yang baik akan lebih menjanjikan dan lebih terpercaya atas dana-dana yang dikelola oleh pihak bank.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi masyarakat dan juga bagi perekonomian negara. Bank menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan

dana dan penyaluran dana, dimana kegiatan tersebut mampu membuat roda perekonomian suatu negara terus berjalan sehingga perputaran uang juga terus terjadi.

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, kegiatan penghimpunan dana dapat berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang nantinya mampu membantu pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana-dananya. Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat dapat berupa pemberian kredit, kegiatan tersebut mampu membantu pihak yang sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, bank dapat juga dikatakan sebagai lembaga intermediasi yang mempunyai peran sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang sedang membutuhkan dana.

Menurut Kasmir (2014:32), mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi dengan prinsip konvensional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa bank dengan prinsip konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum konvensional dalam menjalankan kegiatannya menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga jual dan harga beli atas produknya atau biasa dikenal dengan istilah *spread based*, dan menggunakan atau menerapkan biaya-biaya dalam jasa-jasa lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based* (Kasmir, 2014:33). Menurut Marbelanty (2015), perbankan konvensional mengalami *negative spread* yaitu memiliki kewajiban untuk membayar bunga kepada

nasabahnya pada segala kondisi sehingga menjadi beban yang selalu melekat bagi bank tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, mulailah muncul bank dengan prinsip syariah, yaitu bank yang kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah atau hukum-hukum Islam. Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Budisantoso dan Nuritmo, 2014:207). Bank syariah di Indonesia terbentuk untuk memfasilitasi keinginan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim, sehingga mereka dapat menggunakan jasa dan produk perbankan tanpa takut melanggar larangan dari ajaran Islam (Marbelanty, 2015). Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam sebanyak 207.176.162 orang atau sebesar 87,18% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia (www.tumoutounews.com).

Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Ismail (2011:33), bank umum syariah adalah bank yang berdiri sendiri sesuai dengan aktanya dan bukan bagian dari bank konvensional sedangkan unit usaha syariah masih berada di bawah pengelolaan bank konvensional. Contoh dari Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BCA Syariah, sedangkan contoh dari Unit Usaha Syariah (UUS) adalah Bank Permata Syariah, BII Syariah dan Bank Danamon Syariah. Pertumbuhan bank

umum syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut ditandai dengan mulai banyak bank konvensional yang melakukan konversi dari bank konvensional ke bank syariah, contohnya adalah Bank Syariah Mandiri yang pada awalnya adalah bank konvensional (Danupranata, 2013:34).

Perkembangan jaringan kantor Bank Umum Konvensional pada triwulan II 2017 meningkat sebanyak 756 jaringan kantor yaitu menjadi 136.700 jaringan kantor, sebelumnya pada triwulan I 2017 hanya terdapat 135.944 jaringan kantor. Pada triwulan II 2017, jaringan kantor Bank Umum Syariah bertambah sebanyak 114 jaringan kantor yaitu menjadi 9.929 kantor. Sebelumnya pada triwulan I 2017 jaringan kantor Bank Umum Syariah hanya terdapat 9.815 kantor (www.ojk.go.id).

Jumlah bank umum syariah memang tidak sebanyak bank umum konvensional, namun perkembangan bank umum syariah masih terus meningkat. Pada dasarnya bank umum syariah memiliki fungsi yang sama seperti bank umum konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi atau perantara dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Fahmi (2015:180), perbedaan pandangan yang begitu jelas dalam memahami persoalan bank umum konvensional dan bank umum syariah yaitu pada persoalan bunga (*interest*), artinya bank umum konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbal hasilnya sedangkan bank umum syariah menerapkan prinsip bagi hasil.

Sistem yang diterapkan oleh bank umum konvensional adalah sistem bunga atau *riba* yang biasa disebut dalam istilah Islam. Sistem bunga yang diterapkan oleh bank umum konvensional berupa penetapan bunga simpanan dan bunga

pinjaman. Menurut Fahmi (2015:32), selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan merupakan sumber keuntungan terbesar, sehingga pendapatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Ismail (2011:34) menyatakan bahwa bank umum syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Pengganti dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank umum syariah adalah sistem bagi hasil. Alasan bank umum syariah tidak menerapkan sistem bunga atau *riba* menurut Marbelanty (2015), adalah karena menurut ajaran Islam *riba* dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan dan dapat menguntungkan pihak lainnya.

Sistem bagi hasil yang dimaksud adalah ketika kegiatan usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dua, dan apabila kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugiannya akan ditanggung bersama (Ascarya, 2015:26). Hasil atau jumlah dari keuntungan dan kerugian yang didapat adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Maka semakin tinggi keuntungan yang didapat maka semakin tinggi pula jumlah bagi hasil yang didapat begitupun dengan sebaliknya. Menurut Jahja dan Iqbal (2012), sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank umum syariah mampu membuat nasabah untuk mengawasi langsung kinerja keuangan bank berdasarkan bagi hasil yang didapat. Pada bank umum konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja keuangan bank secara langsung apabila hanya dilihat dari indikator bunga yang diperoleh. Keuntungan dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak

yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapat dana (Ismail, 2011:22).

Penilaian kinerja keuangan bank dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan bank. Maka dari itu laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi keuangannya, sehingga pihak manajemen bank dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Menurut Kasmir (2016:66), agar laporan keuangan menjadi lebih berarti, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Pada proses melakukan analisis laporan keuangan, bank menggunakan beberapa rasio keuangan. Rasio keuangan secara jangka panjang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis kondisi kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2015:148). Rasio keuangan yang dipakai bank diantaranya adalah rasio likuiditas, rasio permodalan, rasio rentabilitas atau rasio profitabilitas, rasio efisiensi, dan rasio aktiva produktif.

Rasio likuiditas menurut Kasmir (2016:221) mampu mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih deposit, semakin besar rasio ini maka semakin likuid bank tersebut. Rasio likuiditas yang digunakan adalah *Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio* (LDR/FDR). Rasio permodalan merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya (Kasmir, 2016:229). Rasio permodalan yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio rentabilitas dapat mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang

bersangkutan (Kasmir, 2016:234). Rasio yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) Menurut Jumingan (2011:243), rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kinerja manajemen bank dalam menggunakan semua asset secara efisien.

Rasio efisiensi yang digunakan adalah Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Berdasarkan SK Direksi BI No. 314.KEP/DIR rasio kualitas aktiva produktif (KAP) merupakan rasio yang mampu mengukur penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana bank dan kontijensi pada transaksi rekening. Rasio yang digunakan adalah *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (NPL/NPF). Masing-masing rasio tersebut mampu menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh bank. Berikut ini merupakan contoh dari ringkasan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio keuangan bank periode 2013 – 2016.

Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Bank Periode 2013 – 2016

Rasio	Bank Umum Konvensional				Mean	Bank Umum Syariah				Mean
	2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	
LDR/FDR	89,70	89,42	92,11	90,70	90,50	95,87	86,66	88,03	85,99	89,14
CAR	18,13	19,57	21,35	22,93	20,50	14,42	15,74	15,02	16,63	15,45
ROA	3,08	2,85	2,32	2,23	2,62	1,58	0,41	0,49	0,63	0,78
BOPO	74,08	76,29	81,45	82,22	78,51	82,16	96,67	97,01	96,22	93,09

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode 2013 – 2016, pada rasio LDR/FDR bank umum konvensional dan bank umum syariah masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun apabila ditinjau dari *mean* (rata-rata), LDR/FDR bank umum konvensional dan bank umum syariah sudah memenuhi standar yang ada, karena menurut BI standar LDR/FDR adalah sebesar

78%-92%. Pada rasio CAR, kedua bank tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2015 bank umum syariah sempat mengalami penurunan. Secara keseluruhan apabila ditinjau dari *mean* yang ada, *mean* bank umum konvensional lebih tinggi dari *mean* bank umum syariah. Maka pada rasio CAR, kinerja bank umum konvensional lebih baik dari bank umum syariah.

Pada rasio ROA bank umum konvensional, setiap tahunnya terus mengalami penurunan sedangkan pada bank umum syariah masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Apabila ditinjau dari *mean*, kinerja bank umum konvensional lebih baik daripada bank umum syariah karena *mean* bank umum konvensional lebih tinggi dari *mean* bank umum syariah. Rasio BOPO kedua bank masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun ditinjau dari hasil *mean* yang ada, kinerja bank umum konvensional lebih baik dari bank umum syariah karena *mean* bank umum konvensional lebih rendah dari bank umum syariah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan bank umum konvensional lebih baik dari bank umum syariah berdasarkan rasio CAR, ROA dan BOPO. Sedangkan pada rasio LDR/FDR kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah sama-sama berada di standar yang telah ditentukan.

Saat ini mulai banyak didirikan bank dengan prinsip syariah, bahkan bank syariah yang didirikan tersebut merupakan hasil dari konversi bank umum konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah di Indonesia antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah (Ismail, 2011:33). Pada penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan pada bank umum konvensional dan bank

umum syariah. Perbandingan tersebut untuk mengetahui apakah bank umum syariah memiliki kinerja keuangan yang sama atau berbeda dengan bank umum konvensional, terlebih kedua bank tersebut menggunakan dua metode yang berbeda dalam mengambil keuntungan serta untuk mengetahui kinerja keuangan bank mana yang lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 – 2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

2. Untuk menganalisa apakah terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah berdasarkan masing-masing rasio keuangan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan kontribusi praktis, antara lain :

1. Kontribusi Akademis
 - a. Bagi penulis, untuk membandingkan teori-teori yang telah didapat selama dibangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan. Selain itu untuk menambah pengetahuan khususnya tentang perbedaan antara Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah dan kinerja keuangannya.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk melakukan pengembangan penelitian yang lebih lanjut.
2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja keuangannya.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan masalah, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori yang melandasi penelitian, dimulai dengan hasil penelitian yang sebelumnya telah ada, pengertian kinerja keuangan, pengertian bank secara umum, fungsi bank, jenis-jenis bank, pengertian bank umum konvensional, pengertian bank umum syariah, perbedaan bank umum konvensional dan bank umum syariah, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, sifat laporan keuangan, keterbatasan laporan keuangan, analisis laporan keuangan, pengertian rasio bank, dan macam-macam rasio bank, serta terdapat kerangka pikir dan hipotesis yang merupakan dugaan sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum perusahaan sampel penelitian, penyajian data, analisis statistik deskriptif variabel penelitian, hasil uji *independent sample t-test* dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menguraikan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan menguraikan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun kepada peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Anggraini (2012) :

Penelitian ini berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional” yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia (mewakili bank syariah), PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia, dan PT. Bank Tabungan Negara (mewakili bank konvensional). Metode yang digunakan adalah uji *independent sample t-test* untuk membandingkan kinerja keuangan kedua perbankan tersebut. Aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek permodalan menggunakan rasio CAR aspek kualitas aktiva produktif menggunakan rasio NPL aspek rentabilitas menggunakan rasio ROA, aspek efisiensi menggunakan rasio BOPO, dan aspek likuiditas menggunakan rasio LDR. Dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa dalam analisis kinerja keuangan yang diperoleh dari rasio CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional jika dilihat dari *mean* kinerja bank secara keseluruhan yang diwakili oleh variabel “Kinerja” dan Kinerja perbankan

syariah tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional.

2. Ningsih (2012) :

Penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia” bertujuan untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan tahap *purposive sample* dan telah mendapatkan 4 sampel, yaitu 2 Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah) dan 2 Bank Konvensional (Bank Mandiri dan Bank Mega). Teknik analisis yang digunakan untuk melihat perbandingannya adalah dengan metode *independent sample t-test*. Dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan CAR, LDR, NPL, BOPO, dan ROA bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia. Bank Umum Syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR dan ROA, sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR, NPL, dan BOPO.

3. Ningtyas (2013) :

Penelitian dengan judul “Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan (Studi pada PT. Bank Mandiri Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Periode 2009-2012) bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara kedua bank tersebut. Rasio keuangan yang digunakan adalah dari rasio permodalan yang diwakili oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP), rasio

rentabilitas diwakili rasio *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) atau *Net Operating Margin* (NOM) untuk bank syariah, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) atau Rasio Efisiensi kegiatan Operasional (REO) untuk bank syariah, serta rasio likuiditas diwakili oleh *Current Ratio*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio permodalan Bank Mandiri lebih baik daripada Bank Syariah Mandiri, rasio kualitas aktiva produktif Bank Mandiri lebih baik daripada Bank Syariah Mandiri, rasio rentabilitas dari rasio ROA, NIM, dan BOPO Bank Mandiri lebih baik daripada Bank Syariah Mandiri, dimana Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuasi namun pada rasio ROE yang lebih baik adalah Bank Syariah Mandiri, serta rasio likuiditas Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri sama-sama mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan menunjukkan kinerja Bank Mandiri lebih baik dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri.

4. Sovia (2016) :

Penelitian berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI yang memiliki Bank Syariah Periode 2012-2014)” dengan menggunakan rasio keuangan CAR, ROA, BOPO/REO, NIM/NOM, LDR/FDR, NPL/NPF, dan ROE. Berdasarkan uji *statistic independent sample t-test* dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA, BOPO/REO. LDR/FDR, NPL/NPF dan ROE, sedangkan berdasarkan rasio CAR dan NIM/NOM tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan mean yang ada, dapat disimpulkan bahwa Bank Konvensional lebih

unggul dari Bank Syariah dalam rasio CAR, ROA, ROE, NPL/NPF dan BOPO, sedangkan Bank Syariah unggul dalam rasio NOM dan FDR.

5. Wahyuni dan Efriza (2017) :

Penelitian berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia” bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional periode 2011-2014 di Indonesia. Rasio keuangan yang digunakan meliputi CAR, ROA, ROE, NPL, BOPO dan NPL. Berdasarkan uji *statistic independent sample t-test* dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan rasio CAR, ROA, ROE, dan LDR. Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL dan BOPO. Berdasarkan rasio CAR, ROA, dan ROE kinerja keuangan bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional. Pada rasio NPL, BOPO, dan LDR kinerja keuangan bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah.

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti	Variabel	Hasil penelitian
Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional (Periode 2009-2011)	Anggraini (2012)	CAR (aspek permodalan), NPL (aspek kualitas aktiva produktif), ROA (aspek rentabilitas), BOPO (aspek efisiensi), LDR (aspek likuiditas).	Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional berdasarkan rasio CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR. Kinerja keuangan perbankan syariah yang

Judul Penelitian	Peneliti	Variabel	Hasil penelitian
			dilihat dari rata-rata (<i>mean</i>) tidak lebih baik dari perbankan konvensional.
Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia	Ningsih (2012)	CAR, LDR, NPL, BOPO, ROA.	Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, LDR, NPL, BOPO dan ROA. Kinerja bank syariah lebih baik pada rasio LDR dan ROA, sedangkan kinerja bank konvensional lebih baik pada rasio CAR, NPL, dan BOPO.
Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan (Studi pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009-2012)	Ningtyas (2013)	CAR (rasio permodalan), KAP (rasio kualitas aktiva produktif), ROA (rasio rentabilitas), ROE (rasio rentabilitas), NIM/NOM (rasio rentabilitas), BOPO/REO (rasio efisiensi), current ratio (rasio likuiditas).	Rasio permodalan, rasio kualitas aktiva produktif, dan rasio rentabilitas (ROA, NIM, BOPO) Bank Mandiri lebih baik dibandingkan Bank Syariah Mandiri. Pada rasio rentabilitas (ROE) Bank Syariah Mandiri lebih baik dibandingkan Bank Mandiri, namun pada rasio likuiditas kedua bank tersebut sama-sama mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan kinerja

Judul Penelitian	Peneliti	Variabel	Hasil penelitian
			keuangan Bank Mandiri lebih baik dibandingkan Bank Syariah Mandiri.
Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Konvensional yang terdaftar di BEI yang memiliki Bank Syariah Periode 2012-2014)	Sovia (2016)	CAR, ROA, BOPO/REO, LDR/FDR, NPL/NPF, ROE, NIM/NOM.	Terdapat perbedaan signifikan pada rasio ROA, BOPO/REO, LDR /FDR, NPL/NPF, dan ROE, sedangkan pada rasio CAR dan NIM /NOM tidak terdapat perbedaan signifikan. Kinerja Bank Konvensional lebih baik berdasarkan rasio CAR, ROA,BOPO,NPL/NPF dan ROE. Sedangkan bank syariah lebih baik berdasarkan rasio NIM/NOM dan LDR/FDR.
Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia	Wahyuni and Efriza (2017)	CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR	Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan rasio CAR, ROA, ROE, LDR. Sedangkan berdasarkan rasio NPL dan BOPO tidak terdapat perbedaan

Judul Penelitian	Peneliti	Variabel	Hasil penelitian
			<p>yang signifikan. Bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dari bank konvensional pada rasio CAR, ROA, ROE. Sedangkan bank konvensional memiliki kinerja yang lebih baik berdasarkan rasio NPL, BOPO dan LDR.</p>

Sumber: Data diolah, 2017

B. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut Fahmi (2015:149) adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauhmana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Jumingan (2011:239) “kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasa diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank”.

Oleh karena itu, kinerja keuangan mampu membuat dan membantu pihak-pihak perusahaan dalam mengambil keputusan untuk rencana di periode selanjutnya. Analisis kinerja keuangan bank menurut Jumingan (2011:239) mengandung beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
2. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Menurut Fahmi (2015:150), bahwa dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum terdapat 5 (lima) tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.

Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

2. Melakukan perhitungan.

Penerapan metode perhitungan adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sebagai hasil dari perhitungan tersebut akan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Hasil hitungan yang sudah diperoleh, kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.

4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan setelah dilakukan

ketiga tahap tersebut. Selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat permasalahan dan kendala yang dialami oleh perbankan tersebut.

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*).

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan dapat diselesaikan.

C. Bank

1. Pengertian Bank

Pengertian bank yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2014:13), “bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan dengan tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sehingga kegiatan tersebut dapat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bank juga menjadi lembaga intermediasi yang mempunyai peran sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan

pihak yang sedang membutuhkan dana sehingga kegiatan perekonomian tetap berjalan secara lancar.

2. Fungsi Bank

Budisantoso dan Nuritomo (2014:9) menjelaskan bahwa secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Fungsi bank dapat dirinci sebagai berikut:

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsure kepercayaan. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

b. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan, keduanya selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah pemberian jaminan bank dan penyelesaian masyarakat.

c. *Agent of Service*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

3. Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir (2014:22), perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Untuk lebih jelasnya jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya
 - a. Bank Umum
Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - b. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)
Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya
 - a. Bank Milik Pemerintah
Merupakan bank yang di mana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah juga.
 - b. Bank Milik Swasta Nasional
Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.
 - c. Bank Milik Asing
Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara.
 - d. Bank Milik Campuran
Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.
3. Dilihat dari Segi Status
 - a. Bank Devisa
Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
 - b. Bank Non Devisa
Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.
4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
 - a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional
Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada nasabahnya menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga jual dan menggunakan menerapkan biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.
 - b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah
Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana maupun pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

4. Pengertian Bank Umum Konvensional

Bank umum konvensional yang telah dijelaskan oleh Budisantoso dan Nuritomo (2014:207) adalah “bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu, persentase ini biasanya ditetapkan per tahun”. Kasmir (2014:33) menjelaskan bahwa dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan suku bunga tertentu. Penentuan ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biasa administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2017), kegiatan usaha bank umum konvensional terdiri atas :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikasi deposito, tabungan, dan dalam bentuk lainnya.

2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, menempatkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh BI.

5. Pengertian Bank Umum Syariah

Pengertian bank umum syariah menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:207) yaitu “bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil”. Menurut Sulhan dan Siswanto (2008:125) “bank umum syariah adalah bank yang

dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dapat juga diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabis Muhammad SAW". Berdasarkan Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008, "perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dimana dalam mengoperasikan usahanya tidak menggunakan sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil dan memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Ascarya (2015:41), berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank umum syariah dapat dibagi ke dalam 6 (enam) kelompok pola, yaitu sebagai berikut:

1. Akad Pola Titipan (*Wadi'ah*)

Secara umum *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan.

 - a. Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Pada prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya.
 - b. Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Pada prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan.

2. Akad Pola Pinjaman (*Qardh*)
Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).
3. Akad Pola Bagi Hasil
 Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*).
 - a. *Mudharabah*
Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.
 - b. *Musyarakah*
Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.
4. Akad Pola Jual Beli
 Jual beli atau perdagangan atau perniagaan atau *trading* secara terminologi Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling *ridha* (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.
 - a. *Murabahah*
Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.
 - b. *Salam*
Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment atau forward buying atau futre sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tngaal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.
 - c. *Istishna*
Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *Salam* yang merupakan jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Syariah.
5. Akad Pola Sewa
Ijarah atau yang biasa disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

- a. *Ijarah*
Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli.
 - b. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*
Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.
6. Akad Pola Lainnya
- Selain pola-pola diatas, masih ada jenis akad lainnya yang biasa digunakan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:
- a. *Wakalah*
Wakalah (*deputyship*) atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
 - b. *Kafalah*
Kafalah (*guaranty*) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).
 - c. *Hawalah*
Hawalah (*Transfer Service*) adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.
 - d. *Rahn*
Rahn (*Mortgage*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
 - e. *Sharf*
Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Produk jasa perbankan yang menggunakan jasa *sharf* adalah fasilitas penukaran uang (*money changer*).
 - f. *Ujr*
Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (*fee based services*), seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya.

6. Perbedaan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Budisantoso dan Nuritomo (2014:209), menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar bank umum syariah dengan bank umum konvensional, yaitu:

1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank umum syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank umum konvensional justru kebalikannya. Hal ini yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank umum syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank umum syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan ataupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya.

3. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), dimana DPS bertugas untuk mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat, yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan.

Berikut tabel yang akan menjelaskan perbedaan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, serta perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank umum konvensional dan bank umum syariah:

Tabel 2.2 Perbedaan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

	Bank Umum Syariah	Bank Umum Konvensional
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Bagi Hasil, jual-beli, sewa	Perangkat Bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit Oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor-Kreditor

Sumber : Fahmi (2015:29)

Tabel 2.3 Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank	Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung dan rugi
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.	Tidak bergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda	Bergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4.	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
5.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama.

Sumber : Budisantoso dan Nuritomo (2014:211)

D. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya tentunya harus membuat perencanaan yang jelas dan akurat. Agar pemasukan dan pengeluaran perusahaan dapat terkendali, pemilik perusahaan dan manajemen tentunya membutuhkan catatan keuangan yang berisi rincian tentang dana-dana yang telah didapat dan dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, catatan tersebut dibuat dalam bentuk pembukuan berupa laporan keuangan selama satu periode tertentu yang pada nantinya berguna untuk melihat hasil akhir dari semua catatan tersebut secara keseluruhan. Kemudian, laporan keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan bagi perusahaan untuk periode selanjutnya.

Menurut Munawir (2012:2), “laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. Kasmir (2016:10) menyatakan bahwa, “laporan keuangan akan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang dapat memudahkan manajemen dalam menilai kinerja manajemen perusahaan. Penilaian kinerja tersebut akan menjadi patokan atau ukuran apakah manajemen mampu mencapai atau berhasil dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuatnya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisikan

neraca dan perhitungan-perhitungan rugi laba yang dimuat dalam lampiran-lampiran, yang mampu menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat menjadi alat komunikasi antara data-data keuangan dengan pihak-pihak yang berperan penting bagi perusahaan dalam menilai kinerja manajemen perusahaan. Menurut Kasmir (2014:283), terdapat lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu :

1. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi jumlah dan jenis kativa (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh, kemudian tergambar juga jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya tersebut terdapat seilih yang disebut laba atau rugi.

3. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*)

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri dari kas masuk (cash in) yang terdiri dari uang yang masuk ke perusahaan, kemudian kas keluar (cash out) yang merupakan sejumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluarannya selama periode tertentu.

4. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Apabila laporan perubahan modal jarang dibuat, artinya tidak terjadi adanya perubahan modal.

5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tersebut.

Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dahulu hingga jelas sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menafsirkannya.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Kasmir (2016:10) bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Menurut Kasmir (2014:280), “laporan keuangan pada bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan, kemudian dari laporan tersebut akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan keuangan juga mampu menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dapat bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pada suatu perusahaan atau bank secara keseluruhan pada periode tertentu, yang nantinya mampu menunjukkan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Setelah mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki maka akan mempermudah manajemen untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada pada kelemahannya dan tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kekuatan yang dimilikinya. Menurut Kasmir (2016:11) tujuan dari pembuatan laporan keuangan adalah :

- a. Memberikan informasi keuangan tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini;

- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
- d. Memberikan suatu informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

3. Sifat Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan harus didasarkan kepada sifat-sifat dari laporan keuangan itu sendiri. Menurut Kasmir (2016:12), dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat sebagai berikut.

- a. Bersifat historis, yaitu artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
- b. Menyeluruh, bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun dengan standar yang telah ditetapkan. Penyusunan yang hanya sebagian-sebagian tidak

akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

4. Keterbatasan Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan yang telah disusun pasti memiliki keterbatasan tertentu, seperti yang telah dijelaskan oleh Kasmir (2016:16) keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (*historis*), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu.
2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidak pastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya.
5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.

Walaupun laporan keuangan mempunyai keterbatasan, namun tidak akan mengurangi arti nilai perusahaan secara langsung karena hal ini memang harus dilakukan agar dapat menunjukkan kejadian yang mendekati sebenarnya meskipun perubahan berbagai kondisi dari berbagai sektor terus terjadi, artinya laporan keuangan tetap disusun sesuai dengan aturan yang

telah ditetapkan dan dianggap telah memenuhi syarat sebagai suatu laporan keuangan (Kasmir, 2016:16).

5. Analisis Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini, sehingga dapat dilihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak (Kasmir, 2016:66).

Analisis laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang kondisi perusahaannya seperti kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu. Apabila manajemen mengetahui kondisi tersebut, maka mampu membantu manajemen untuk meminimalisir maupun menutupi kelemahan-kelemahan yang ada untuk periode selanjutnya dan mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kekuatan yang dimilikinya. Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2016:68).

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

E. Rasio Keuangan Bank

1. Pengertian Rasio Keuangan Bank

Jumingan (2011:243) mengungkapkan bahwa rasio dalam analisis laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Setiap rasio keuangan yang dibentuk memiliki tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak dijumpai batasan yang jelas dan tegas berapa rasio yang terdapat pada setiap aspek yang dianalisis.

Pada dasarnya rasio yang digunakan pada bank tidak jauh berbeda dengan rasio keuangan pada perusahaan non bank lainnya. Perbedaan yang terdapat antara rasio bank dan perusahaan non bank yaitu terletak pada jenis rasio yang digunakan untuk menilai suatu rasio yang jumlahnya lebih banyak, karena komponen neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki bank berbeda dengan laporan neraca dan laporan laba rugi milik perusahaan non bank.

Dalam mengelola dananya bank membutuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga risiko yang dihadapi bank jauh lebih besar ketimbang perusahaan non bank lainnya dan ada beberapa rasio yang dikhususkan untuk memperhatikan rasio-rasio tersebut (Kasmir, 2016:216).

2. Macam-macam Rasio Keuangan Bank

Adapun beberapa macam rasio keuangan yang dapat digunakan bank, yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas bank menurut Kasmir (2016:221) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih oleh deposan. Artinya, bank mampu membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat waktu yang ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini, maka semakin likuid bank tersebut. Pengukuran rasio ini terdapat beberapa jenis rasio yang memiliki tujuan tertentu, jenis-jenis dari rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

a) *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan tabungan, giro, dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank (Kasmir, 2016:221). Rumus untuk menghitung *quick ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2016:221)

b) *Investing Policy Ratio*

Investing policy ratio merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya (Kasmir, 2014:316). Rumus untuk menghitung *investing policy ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Investing Policy Ratio} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2014:316)

c) *Banking Ratio*

Banking ratio merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki (Kasmir, 2014:317). Rumus yang digunakan untuk mengukur *banking ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2014:317)

d) *Assets to Loan Ratio (ALR)*

Assets to loan ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Apabila semakin tinggi tingkat rasio ini, maka semakin

rendah tingkat likuiditas bank (Kasmir, 2016:224). Rumus untuk menghitung *assets to loan ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Assets to Loan Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2016:224)

e) *Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio (LDR/FDR)*

LDR/FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2016:225). *Loan to deposit ratio* (LDR) merupakan rasio yang digunakan oleh bank umum konvensional, sedangkan *financing to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan oleh bank umum syariah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar LDR/FDR adalah sebesar 78% - 92%. Semakin tinggi rasio ini maka semakin mengindikasikan bahwa semakin rendahnya likuiditas bank tersebut (Silviana, 2016). Rumus untuk menghitung *loan to deposit ratio* (LDR) adalah sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan – OJK Triwulan II 2017

Rumus yang digunakan untuk menghitung *financing to deposit ratio* (FDR) adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}} \times 100\%$$

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan – OJK Triwulan II 2017

Pada penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mewakili rasio likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio* (LDR/FDR) karena rasio ini dapat menggambarkan kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada nasabahnya berupa kredit/pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio LDR/FDR maka semakin rendah tingkat likuidasi bank tersebut, begitupun dengan sebaliknya apabila semakin rendah rasio LDR/FDR maka mencerminkan bahwa semakin likuid bank tersebut.

2. Rasio Permodalan

Rasio permodalan menurut Kasmir (2016:229) adalah ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Rasio ini juga merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut. Berikut ini adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur rasio permodalan.

a) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital adequacy ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang berguna untuk menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit/pembiayaan (Jumingan, 2011:243). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar CAR adalah minimal sebesar 8%. Semakin besar rasio CAR maka mencerminkan

kemampuan bank yang semakin baik dalam dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian (Suwandi, 2017). Rumus yang digunakan untuk menghitung *capital adequacy ratio* sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan – OJK Triwulan II 2017

b) *Primary Ratio*

Primary ratio menurut Kasmir (2014:322) merupakan rasio untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan terjadi dalam total asset masuk dapat ditutupi oleh *capital equity*. Rumus untuk mencari *primary ratio* adalah:

$$\text{Primary Ratio} = \frac{\text{Equity Capital}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2014:323)

c) *Risk Assets Ratio*

Risk assets ratio menurut Kasmir (2014:323) merupakan rasio untuk mengukur kemungkinan penurunan *risk assets*. Rumus untuk mencari *risk assets ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Risk Assets Ratio} = \frac{\text{Equity Capital}}{\text{Total Assets} - \text{Cash Assets} - \text{Securities}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2014:323)

d) *Secondary Risk Ratio*

Secondary risk ratio menurut Kasmir (2014:324) merupakan rasio untuk mengukur penurunan asset yang mempunyai resiko lebih tinggi. Rumus untuk mencari *secondary risk ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Secondary Risk Ratio} = \frac{\text{Equity Capital}}{\text{Secondary Risk Ratio}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2014:324)

e) *Capital Ratio*

Capital ratio menurut Kasmir (2014:325) merupakan rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung prekreditasi, terutama resiko yang terjadi karena bunga gagal di tagih.

Rumus untuk mencari *capital ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Ratio} = \frac{\text{Equity Capital} + \text{Reserve for Loan Losses}}{\text{Total Loans}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2014:325)

Rasio yang digunakan untuk mewakili rasio permodalan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), karena CAR mampu menunjukkan seberapa besar modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank. Semakin besar nilai rasio CAR maka akan mencerminkan kemampuan bank yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian.

3. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas sering disebut juga sebagai profitabilitas usaha, dimana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kasmir, 2016:234). Jenis rasio yang dapat mengukur rasio rentabilitas adalah sebagai berikut:

a) *Return on Assets* (ROA)

Return on assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Kasmir, 2010). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar ROA adalah diatas 1,5%. Semakin tinggi rasio ROA suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik bank tersebut dalam menggunakan asetnya (Ningsih, 2012). Rumus yang digunakan untuk menghitung *return on assets* sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan – OJK Triwulan II 2017

b) *Return on Equity* (ROE)

Rasio *return on equity* disebut juga dengan laba atas equity atau rasio *total asset turnover* atau perputaran total asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Fahmi, 2015:155). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar ROE adalah diatas 12%. Semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik bank tersebut dalam menghasilkan laba atas ekuitas yang dimilikinya (Umardani dan Muchlish, 2016). Adapun rumus *return on equity* (ROE) adalah:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholders' Equity}} \times 100\%$$

Sumber: Fahmi (2015:155)

c) *Gross Profit Margin (GPM)*

Gross profit margin menurut Kasmir (2014:327) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Rumus untuk mencari *gross profit margin* adalah:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Operating Income} - \text{Operating Expense}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2014:327)

d) *Net Profit Margin (NPM)*

Net profit margin menurut Kasmir (2014:328) adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokoknya. Rumus untuk mencari *net profit margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2014:328)

e) *Rate Return on Loans*

Rate return loans menurut Kasmir (2014:330) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Rumus untuk mencari *rate return loans* adalah sebagai berikut:

$$\text{Rate Return Loans} = \frac{\text{Interest Income}}{\text{Total Loans}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2014:330)

f) *Interest Expense Ratio*

Interest expense ratio menurut Kasmir (2014:333) merupakan rasio untuk mengukur besarnya persentase antara bunga yang dibayar kepada para deposannya dengan total deposit yang ada di bank. Rumus untuk mencari *interest expense ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Interest Expense Ratio} = \frac{\text{Interest Expense}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2014:333)

Rasio yang digunakan untuk mewakili rasio rentabilitas adalah *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Rasio ROA mampu mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ROA suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank tersebut dan semakin baik pula bank tersebut dalam menggunakan asetnya. Rasio ROE mampu mengukur kemampuan modal bank dalam memperoleh keuntungan. Semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik bank tersebut dalam menghasilkan laba atas ekuitas yang dimilikinya dan nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ikut meningkat.

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kinerja manajemen bank dalam menggunakan semua asset secara efisien (Jumingan, 2011:243). Jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur rasio efisiensi adalah sebagai berikut.

a) **Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Beban operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (LPIP OJK Triwulan II, 2017). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar BOPO adalah dibawah 92%. Semakin rendah rasio BOPO maka akan menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya (Suwandi, 2017). Rumus yang digunakan untuk menghitung beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan – OJK Triwulan II 2017

b) *Cost of Fund*

Cost of fund menurut Jumingan (2011:246) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank untuk membayar biaya bunga dibanding rata-rata dana yang dimiliki. Rumus untuk mencari *cost of fund* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cost of Fund} = \frac{\text{Interest Paid}}{\text{Total Fund}} \times 100\%$$

Sumber: Jumingan (2011:246)

c) *Cost of Money*

Cost of money menurut Jumingan (2011:246) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar rata-rata keseluruhan biaya

yang dikeluarkan bank dalam penghimpunan dana. Rumus untuk mencari *cost of money* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cost of Money} = \frac{\text{Cost of Fund} + \text{Overgead Exp.}}{\text{Total Fund}} \times 100\%$$

Sumber: Jumingan (2011:246)

d) *Cost of Loanable Fund*

Cost of loanable fund menurut Jumingan (2011:246) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui biaya variabel yang digunakan untuk memperoleh *loanable fund*. Rumus yang digunakan untuk mencari *cost of loanable fund* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cost of Loanable Fund} = \frac{\text{Cost of Fund}}{\text{Total Fund} - \text{Un Loanable Fund}} \times 100\%$$

Sumber: Jumingan (2011:246)

Rasio yang digunakan untuk mewakilkan rasio efisiensi adalah rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) karena rasio ini dapat menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin rendah rasio BOPO maka akan menunjukkan bahwa semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Apabaila efisiensi bank tersebut baik, maka keuntungan yang akan diperoleh bank tersebut akan semakin besar.

5. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Pengertian rasio kualitas aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/4/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998

tentang Kualitas Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

a) *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (NPL/NPF)

NPL/NPF merupakan rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kredit/pembiayaan bermasalah yang telah disalurkan oleh bank. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin menunjukkan bahwa bank tersebut tidak dalam kondisi yang sehat karena NPL/NPF yang tinggi akan menyebabkan laba yang diterima oleh bank akan menurun (Suwandi, 2017). Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa standar rasio NPL/NPF adalah maksimal 5% (Bank Indonesia, 2011). *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang digunakan bank umum konvensional, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan oleh bank umum syariah. Rumus yang digunakan untuk menghitung *non performing loan* (NPL) adalah:

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

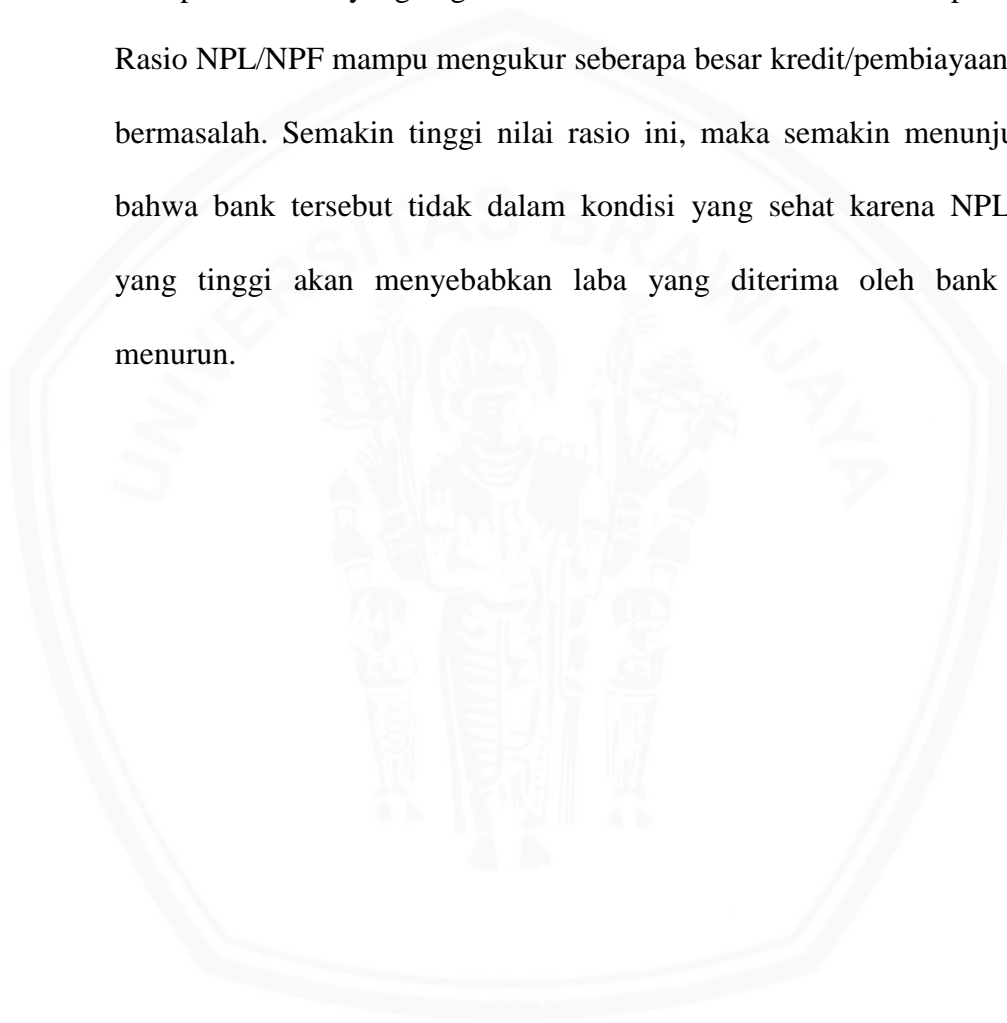
Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan – OJK Triwulan II 2017

Rumus yang digunakan untuk mencari *non performing financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

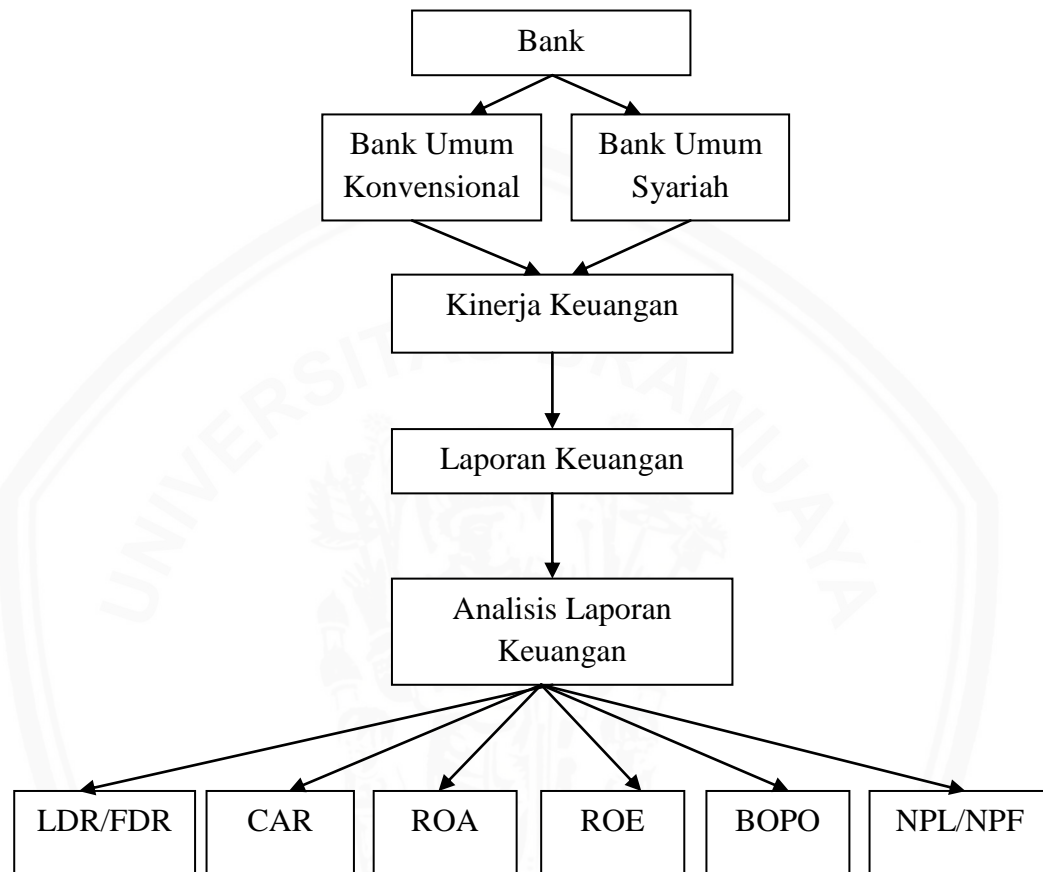
Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan – OJK Triwulan II 2017

Rasio *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (NPL/NPF) merupakan rasio yang digunakan dalam rasio kualitas aktiva produktif. Rasio NPL/NPF mampu mengukur seberapa besar kredit/pembiayaan yang bermasalah. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin menunjukkan bahwa bank tersebut tidak dalam kondisi yang sehat karena NPL/NPF yang tinggi akan menyebabkan laba yang diterima oleh bank akan menurun.



F. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Data diolah, 2017

G. Hipotesis

Sugiyono (2016:64) mengemukakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara pada suatu rumusan masalah, dimana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bisa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pada Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah dan teori-teori yang telah dijelaskan maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2015:29) merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode dengan pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016:8). Jenis penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank umum konvensional dengan bank umum syariah berdasarkan rasio keuangan bank.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peneliti menggunakan bank yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Bab 1 Pasal 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyediakan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang disajikan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*). Selain telah tersedianya sumber data yang dibutuhkan, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena bank yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan bank yang *go public* sehingga laporan keuangannya telah diaudit dan keakuratannya terjamin. Data sekunder tersebut dapat diakses melalui situs resmi OJK yaitu www.ojk.go.id dan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dapat diakses juga pada situs resmi masing-masing bank yang bersangkutan.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan kedua jenis bank, oleh karena itu diperlukan variabel-variabel yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Adapun beberapa variabel yang digunakan oleh peneliti agar penelitian ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan mendapatkan hasil yang akurat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan bank, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio (LDR/FDR)*

LDR/FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2016:225). *Loan to deposit ratio*

(LDR) merupakan rasio yang digunakan oleh bank umum konvensional, sedangkan *financing to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan oleh bank umum syariah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar LDR/FDR adalah sebesar 78% - 92%. Semakin tinggi rasio ini maka semakin mengindikasikan bahwa semakin rendahnya likuiditas bank tersebut (Silviana, 2016). Rumus untuk menghitung *loan to deposit ratio* (LDR) adalah sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung *financing to deposit ratio* (FDR) adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}} \times 100\%$$

2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital adequacy ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang berguna untuk menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit/pembiayaan (Jumingan, 2011:243). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar CAR adalah minimal sebesar 8%. Semakin besar rasio CAR maka mencerminkan kemampuan bank yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian (Suwandi, 2017). Rumus yang digunakan untuk menghitung *capital adequacy ratio* sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

3. *Return on Assets* (ROA)

Return on assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Kasmir, 2010). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar ROA adalah diatas 1,5%. Semakin tinggi rasio ROA suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik bank tersebut dalam menggunakan asetnya (Ningsih, 2012). Rumus yang digunakan untuk menghitung *return on assets* sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

4. *Return on Equity* (ROE)

Rasio *return on equity* disebut juga dengan laba atas equity atau rasio *total asset turnover* atau perputaran total asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Fahmi, 2015:155). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar ROE adalah diatas 12%. Semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik bank tersebut dalam menghasilkan laba atas ekuitas yang dimilikinya (Umardani dan Muchlish, 2017). Adapun rumus *return on equity* (ROE) adalah:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholders' Equity}} \times 100\%$$

5. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (LPIP OJK Triwulan II, 2017). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar BOPO adalah dibawah 92%. Semakin rendah rasio BOPO maka akan menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya (Suwandi, 2017). Rumus yang digunakan untuk menghitung beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

6. *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (NPL/NPF)

NPL/NPF merupakan rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kredit/pembiayaan bermasalah yang telah disalurkan oleh bank. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin menunjukkan bahwa bank tersebut tidak dalam kondisi yang sehat karena NPL/NPF yang tinggi akan menyebabkan laba yang diterima oleh bank akan menurun (Suwandi, 2017). Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa standar rasio NPL/NPF adalah maksimal 5% (Bank Indonesia, 2011). *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang digunakan bank umum konvensional, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan oleh bank umum syariah. Rumus yang digunakan untuk menghitung *non performing loan* (NPL) adalah:

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Rumus yang digunakan untuk mencari *non performing financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

D. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2016:80) adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, serta telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh bank umum konvensional dan seluruh bank umum syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2016:80) merupakan “sebagian kecil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi yang nantinya diambil berdasarkan ketentuan tertentu sehingga dapat mewakili populasinya”. Metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu dimana dalam penentuan sampelnya berdasarkan kriteria-kriteria yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Berikut ini akan dijelaskan beberapa kriteria yang dimaksud untuk menentukan sampel pada bank umum konvensional:

1. Bank umum konvensional yang telah terdaftar pada OJK telah mempublikasikan laporan keuangan tahunannya selama periode 2013 – 2016 secara *go public*.

2. Bank umum konvensional yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memiliki anak perusahaan berupa bank umum syariah yang telah terdaftar dan diawasi OJK .
3. Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang telah terdaftar dan diawasi OJK mempublikasikan rasio keuangan yang akan diteliti.

Berikut ini merupakan kriteria-kriteria yang dimaksud untuk menentukan sampel pada bank umum syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang telah terdaftar pada OJK telah mempublikasikan laporan keuangan tahunannya selama periode 2013–2016 secara *go public*.
2. Bank umum syariah tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK merupakan anak perusahaan dari bank umum konvensional.
3. Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang telah terdaftar dan diawasi OJK mempublikasikan rasio keuangan yang akan diteliti.

Berdasarkan kriteria diatas ditemukan sampel dengan hasil *purposive sampling* yang terdapat pada *lampiran 1* dan *2*, maka peneliti menggunakan 10 Bank Umum Konvensional dan 10 Bank Umum Syariah sebagai sampel :

Tabel 3.1 Bank Umum Konvensional yang akan dianalisis

No.	Nama Bank Umum Konvensional
1.	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
2.	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
3.	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4.	PT. Bank Central Asia, Tbk
5.	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
6.	PT. Bank Mega, Tbk
7.	PT. Bank Bukopin, Tbk
8.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
9.	PT. Bank Victoria International, Tbk
10.	PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk

Sumber : Data diolah, 2018

Tabel 3.2 Bank Umum Syariah yang akan dianalisis

No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank BRI Syariah
2.	PT. Bank Syariah Mandiri
3.	PT. Bank BNI Syariah
4.	PT. Bank BCA Syariah
5.	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia
6.	PT. Bank Syariah Mega Indonesia
7.	PT. Bank Syariah Bukopin
8.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
9.	PT. Bank Victoria Syariah
10.	PT. B.P.D Jawa Barat dan Banten Syariah

Sumber : Data diolah, 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti diperoleh melalui metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang telah di publikasikan oleh masing-masing bank yang dapat di akses di *website* Otoritas Jasa Keuangan dan *website* masing-masing bank pada periode 2013 sampai dengan 2016. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka berupa jurnal, buku, penelitian terdahulu dan artikel sebagai bahan pengumpulan data dan teori yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Salah satu bagian terpenting dalam melakukan sebuah penelitian adalah dengan melakukan analisis data, karena analisis data mampu memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016:169), analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, nilai minimum dan nilai rata-rata dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Analisis Uji Beda Dua Rata-rata (*Independent Sample T-Test*)

Teknik analisis data yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah yaitu menggunakan teknik statistik berupa uji beda dua rata-rata (*independent sample t-test*). Tujuan dari uji hipotesis berupa uji beda dua rata-rata (*independent sample t-test*) pada penelitian ini adalah untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis yang telah dibuat. Penentuannya adalah sebagai berikut :

Jika F hitung dengan *equal variance assumed* (diasumsi kedua varians sama) memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ maka dinyatakan bahwa kedua varians sama. Bila kedua varians sama, maka sebaiknya menggunakan dasar *equal variance assumed* (diasumsi kedua varian sama) untuk uji t. Jika uji t signifikansinya $< 0,05$, dikatakan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah terdapat perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika uji t signifikansinya $> 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Jika uji F dengan *equal variance assumed* (diasumsikan kedua varians sama) memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka dinyatakan bahwa kedua varians berbeda. Bila kedua varians berbeda, maka untuk membandingkan kedua populasi dengan uji t sebaiknya menggunakan dasar *equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varians tidak sama) untuk uji t. Jika uji t dengan *equal varians not assumed* (diasumsikan kedua varians tidak sama) memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa pada kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun jika signifikansinya $< 0,05$ dapat dinyatakan bahwa pada kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah terdapat perbedaan yang signifikan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik dalam segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK), disebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010.

Namun baru gagal pada tahun 2011 RUU tentang OJK menjadi UU OJK. Alasan pembentukan OJK ini antara lain makin kompleks dan bervariasi produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan bahwa BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, dimana sebanyak 16 bank dilikuidasi pada saat itu.

3. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini diamanatkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagai mana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, sudah menghadapi berbagai kontroversi mengenai sudah tepatkah pemindahan fungsi pengawasan perbankan yang semula ditangani oleh Bank Indonesia. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa setelah keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

5. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut :

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
 - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (*credit testing*) dan standar akuntansi bank.
 - 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, anti-pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi :

- 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
 - 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
 - 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
 - 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
 - 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
 - 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
 - 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
 - 3) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu.
 - 4) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan,

pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 8) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

B. Gambaran Umum Perusahaan

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1

tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia.

Pada saat masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan public dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai saat ini. Kantor pusat Bank BRI berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210.

Saat ini, Bank BRI memiliki 19 kantor wilayah, 1 kantor cabang khusus, 609 kantor cabang pembantu, 984 kantor kas, 5.380 BRI unit, 3.180 teras dan teras keliling dan 3 teras kapal. Bank BRI juga memiliki 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands dan Singapura, 2 kantor

perwakilan yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta memiliki 5 anak usaha yaitu Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO/BRI Agro), PT. Bank BRI Syariah, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRI Life dahulu dikenal Bringin Life), BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong dan PT. BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance), dimana masing-masing anak usaha ini dimiliki oleh Bank BRI sebesar 87,23%, 99,99875%, 91,001%, dan 99% dari total saham yang dikeluarkan.

Pada tanggal 31 Oktober 2003, Bank BRI memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBRI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.811.765.000 dengan nilai nominal Rp.500,- per saham dengan harga penawaran Rp.875,- per saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp.875,- setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 November 2003.

2. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk

Bank Mandiri merupakan bank telah beroperasi selama 15 tahun. Bank Mandiri adalah bank hasil upaya pemerintah merestrukturisasi perbankan pasca krisis tahun 1998, maka pada tahun 2 Oktober 1998 Bank Mandiri

resmi didirikan. Pada Juli 1999, terdapat empat bank milik pemerintah, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia, digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Keempat bank tersebut telah beroperasi di Indonesia dan mencatatkan sejarah perbankan Indonesia yang berawal dari 150 tahun yang lalu.

Bank Bumi Daya awalnya merupakan perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV yang dinasionalisasi menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Kemudian pada tahun 1964, bank milik Inggris yaitu Chartered bank juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberikan hak untuk melanjutkan operasi bank tersebut. Setahun kemudian, bank Umum Negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi bank Negara Indonesia Unit IV. Pada tahun 1968, beralih nama menjadi bank Bumi Daya. Bank Dagang

Negara awalnya bernama Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij yang didirikan pada tahun 1857. Bank ini merupakan tertua di Indonesia yang berkedudukan di Batavia. Pada tahun 1949, namanya beralih menjadi Escomptobank NV yang kemudian pada tahun 1969 dinasionalisasi menjadi Bank Dagang Negara. Bank Dagang Negara merupakan bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan. Bank Ekspor Impor Indonesia bermula dari perusahaan dagang Belanda N.V Nederlansche Handels Maarschappij pada tahun 1827 dan di tahun 1870 berkembang di sektor perbankan. Kemudian pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960 dan menggabungkan dengan Bank Negara

Indonesia sehingga menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Ekspor-Import. Bank ini yang akhirnya menjadi Bank Ekspor-Import Indonesia yang merupakan bank milik pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor.

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) awalnya merupakan Bank Industri Negara (BIN) yang merupakan bank industri yang berdiri tahun 1951. Misi BIN adalah mendukung perkembangan sektor ekonomi tertentu, yang berfokus pada perkebunan, industri, dan pertambangan. Pada tahun 1960, Bapindo dibentuk sebagai bank milik Negara kemudian digabungkan dengan BIN. Bapindo membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi, dan pariwisata. Perjalanan sejarah keempat bank milik pemerintah tersebut yang kemudian digabungkan dengan Bank Mandiri pada Juli 1999 menjadi warisan tak ternilai bagi Bank Mandiri.

Sejak berdirinya, Bank Mandiri meneruskan pelayanan jasa perbankan dan keuangan yang telah menjadi tonggak sejarah dengan pengalaman lebih dari 150 tahun yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998. Bank Mandiri merupakan bank milik Pemerintah Republik Indonesia yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saham sebesar 60% dimiliki bank pemerintah Republik Indonesia dan 40% sisanya dimiliki publik. Kantor pusat Bank Mandiri

berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta Selatan 12190 – Indonesia.

Saat ini, Bank Mandiri mempunyai 12 kantor wilayah domestik, 76 kantor area, dan 1.143 kantor cabang pembantu, 944 kantor mandiri mitra usaha, 244 kantor kas dan 6 cabang luar negeri yang berlokasi Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Dili Timor Plaza dan Shanghai (Republik Rakyat China). Pemegang saham pengendali Bank Mandiri adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 60%. Pada tanggal 23 Juni 2003, Bank Mandiri memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) kepada masyarakat sebanyak 4.000.000.000 saham Seri B dengan nominal Rp.500,- per saham dengan harga penawaran Rp.675,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 14 Juli 2003.

3. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Pada tanggal 5 Juli 1964, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI didirikan dan menjadi bank pertama milik Negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bank BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Oeang Republik Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada

tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia. Menyusul penunjukan De Javasche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai bank sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peran Bank BNI sebagai bank sentral. Bank BNI lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa pada tahun 1950 dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Kantor cabang Bank BNI pertama di luar negeri dibuka di Singapura pada tahun 1955. Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung, bank Keliling, Bank Bocah dan Bank Sarinah, tujuan utama dari pembentukan Bank Terapung adalah untuk melayani masyarakat yang tinggal di kepulauan seperti Kepulauan Riau atau daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat seperti Kalimantan.

Bank BNI juga meluncurkan Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai upaya proaktif untuk mendorong masyarakat menabung. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, Bank BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Selama masa perjalanannya, Bank BNI telah mereposisi identitas korporatnya untuk menyesuaikan dengan pasar keuangan yang dinamis. Identitas pertama sejak Bank BNI berdiri berupa lingkaran warna merah dengan tulisan BNI

1946 Berwarna emas melambangkan persatuan, keberanian, dan patriotism yang memang merefleksikan semangat BNI sebagai bank perjuangan.

Pada tahun 1988, identitas korporat berubah menjadi logo layar kapal dan gelombang untuk merepresentasikan posisi Bank BNI sebagai Bank Pemerintah Indonesia yang siap memasuki pasar keuangan dunia dengan memiliki kantor cabang di luar negeri. Gelombang mencerminkan gerak maju Bank BNI yang dinamis sebagai bank komersial Negara yang berorientasi pada pasar. Kantor pusat Bank BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 – Indonesia. Bank BNI memiliki 196 kantor cabang, 944 cabang pembantu domestik serta 829 outlet lainnya. Selain itu, jaringan Bank BNI juga meliputi 5 kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London dan Korea Selatan serta 1 kantor perwakilan di New York. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 60,00%.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan (termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah melalui anak usaha). Selain itu, Bank BNI juga menjalankan kegiatan usaha diluar perbankan melalui anak usahanya, antara lain: asuransi jiwa, pembiayaan, sekuritas dan jasa keuangan. Pada tanggal 28 Oktober 1996, BNI memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Seri B kepada masyarakat sebanyak 1.085.032.000 dengan nilai

nominal Rp.500,- per saham dengan harga penawaran Rp. 850,- per sham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 November 1996.

4. PT. Bank Central Asia, Tbk

Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1955 dengan nama “N.V. Perseroan Dagang Industrie Semarang Knitting Factory” dan mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 Oktober 1956. Selama beroperasi BCA mengalami beberapa kali perubahan nama sampai akhirnya pada tanggal 21 Mei 1974 menjadi PT. Bank Central Asia. Salah satu kejadian penting dalam sejarah BCA adalah pada tahun 1997 ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi tersebut mempengaruhi aliran dana tunai BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutan perusahaan.

Dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan menurun, banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, BCA harus meminta bantuan dari pemerintah. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tanggal 28 Mei 1998 mengambil alih operasi dan manajemen BCA. Sesuai dengan keputusan tersebut, status BCA diubah menjadi *Bank Taken Over* (BTO) dan status ini berakhir paa tanggal 28 April 2000. Setelah masa restrukturisasi selesai, pada bulan Mei 2000, Anggaran Dasar BCA mengalami perubahan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham. Kondisi ini mengubah status BCA menjadi perusahaan terbuka dan nama bank menjadi PT. Bank Central Asia

Tbk. Selanjutnya penawaran saham kedua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPN mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya di BCA. Pada tahun 2002, BPPN melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui tender penempatan privat yang strategis. Farindo Investment, Ltd., yang berbasis di Mauritius memenangkan tender tersebut.

Kantor Pusat Bank BCA berlokasi di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H Thamrin No. 1, Jakarta 10310. Saat ini, Bank BCA memiliki 989 kantor cabang di seluruh Indonesia serta 2 kantor perwakilan luar negeri yang berlokasi di Hong Kong dan Singapura. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank BCA adalah PT. Dwimuria Investama Andalan (54,94%). Pemegang saham PT. Dwimuria Investama Andalan adalah Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono, sehingga pengendali terakhir Bank BCA adalah Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono.

Pada tanggal 11 Mei 2000, Bank BCA memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) sebanyak 662.400.000 saham dengan jumlah nilai nominal Rp.500,- dengan harga penawaran Rp.1.400,- per saham, yang merupakan 22% dari modal saham yang ditempatkan dan disetor, sebagai bagian dari divestasi pemilikan saham Republik Indonesia yang diwakili oleh Badan Penyelenggara Perbankan Nasional (BPPN). Penawaran umum ini dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Mei 2000. Saat ini, BCA terus memperkuat tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi dan pengelolaan resiko secara baik.

5. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk

PT. Bank Maybank Indonesia Tbk adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, PT. Bank Maybank Indonesia Tbk bernama PT. Bank Internasional Indonesia (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan izin sebagai devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah *merger* menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989. Sejak menjadi perusahaan publik, BII telah tumbuh menjadi salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia. Pada 30 September 2008, Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd. (MOCS), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Malayan Banking Berhad (Maybank), menyelesaikan pengambilalihan 100% saham Sorak Financial Holdings Pte, Ltd, pemilik 55,51% saham BII.

Pada Desember 2008, MOCS menyelesaikan penawaran tender untuk sisa saham BII dan meningkatkan kepemilikannya. Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang terkoneksi dengan jaringan regional maupun internasional Grup Maybank. Per 31 Desember 2016 Maybank Indonesia memiliki 428 cabang termasuk cabang syariah dan kantor fungsional mikro yang tersebar di Indonesia serta dua cabang luar negeri (Mauritius dan Mumbai, India), 19 Mobil Kas Keliling dan 1.633 ATM termasuk CDM (Cash Deposit Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM

BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura dan Malaysia melalui jaringan MEPS.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu: Sorak Financial Holdings Pte. Ltd (45,02%), Maybank Offshore Corporate Service (33,96%) dan UBS AG London (18,31%). Pemegang pengendali utama Bank Maybank Indonesia adalah Malayan Banking Berhad (Maybank). Maybank mengendalikan Bank Maybank Indonesia melalui Sorak Financial Holdings Pte. Ltd dan Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn. Bhd. Bank Maybank memiliki anak usaha juga yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yakni Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. Pada tanggal 02 Oktober 1989, Bank Maybank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) kepada masyarakat sebanyak 12.000.000 dengan nilai nominal Rp.1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp.11.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 21 November 1989.

6. PT. Bank Mega, Tbk

Bank Mega Tbk didirikan pada tanggal 15 April 1969 dengan nama PT. Bank Karman dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1969. Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama Bank Karma yang didirikan pada tanggal 15 April 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi Mega Bank dan melakukan relokasi kantor pusat ke Jakarta. Seiring dengan

perkembangannya Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh CT Corp (d/h Para Group) (PT Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), untuk lebih meningkatkan citra Mega Bank.

Pada bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo dengan tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat dengan akan lebih mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru berubah nama menjadi Bank Mega. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun yang sama Bank Mega melaksanakan Initial Public Offering dan listed di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dengan demikian sebagian saham Bank Mega dimiliki oleh public dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk. Pada saat krisis ekonomi, Bank Mega mencuat sebagai salah satu bank tidak terpengaruh oleh krisis dan tumbuh terus tanpa bantuan pemerintah bersama dengan Citibank, Deutsche Bank dan HSBC. Bank Mega merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang mobil operasionalnya menggunakan Livery Bank Mega. Strategi ini berhasil menanamkan image yang begitu kuat dikalangan gross root Bangsa Indonesia. Hingga kini Bank Mega masih merupakan bank yang kepemilikannya 100% milik warga Indonesia, saat mayoritas usaha di sektor keuangan Indonesia dimonopoli oleh asing.

Kantor pusat Bank Mega berlokasi di Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta 12790 – Indonesia. Bank Mega memiliki 53 kantor cabang, 289 kantor cabang pembantu dan 7 kantor kas. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Mega Tbk adalah PT. Mega

Corpora (induk usaha), dengan kepemilikan sebesar 57,87%. Induk usaha terakhir Bank Mega adalah CT Corporation (dahulu Para Group). Saham CT Corporation dimiliki 100% oleh Chairul Tanjung dan Keluarga. Pada tanggal 15 Maret 2000, Bank Mega memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) kepada masyarakat sebanyak 112.500.000 dengan nilai nominal Rp.500,- per saham dengan harga penawaran Rp.1.200,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 17 April 2000.

7. PT. Bank Bukopin, Tbk

Bank Bukopin yang berdiri sejak tanggal 10 Juli 1970 memfokuskan diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi asset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan consumer. Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang baik.

Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel. Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time on-line. Bank Bukopin

juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama “Swamitra”, yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. Struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan *Initial Public Offer* (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terus mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang.

Penerapan strategi tersebut ditunjukkan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi. Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran terciptanya Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat, dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank Bukopin tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Bukopin Tbk, antara lain: PT. Bosowa Corporindo (pengendali) (30%), Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO) (18,09%) dan Negara Republik Indonesia (11,43%). Pada tanggal 30 Juni 2006, BBKP memperoleh pernyataan efektif BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBKP (IPO) kepada masyarakat sejumlah 843.765.500 saham dengan nilai nominal Rp.100,- per saham dan harga penawaran sebesar

Rp.350,- per saham. Saham-saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Juli 2006.

8. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk

Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau yang disingkat Bank BTPN terlahir dari pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun 1958 di Bandung. Ketujuh serangkai tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjadi rentenir.

Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, pada tahun 1986 para anggota perkumpulan BAPEMIL membentuk PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan untuk melanjutkan kegiatan usaha BAPEMIL. Berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998) yang antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada dua yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank BTPN diubah dari Bank tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993.

Perubahan status Bank BTPN tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Surat Bank Indonesia No.26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status Perseroan sebagai Bank Umum. Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudia berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Bank BTPN memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada Nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Namun, aktivitas utama BTPN adalah tetap mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market Bank BTPN adalah para pensiunan. Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya, Bank BTPN bekerja sama dengan PT. Taspen, sehingga Bank BTPN tidak saja dapat memberikan pinjaman dan pemotongan cicilan pinjaman, tetapi juga dapat melaksanakan “Tri Program Taspen”, yaitu Pembayaran Tabungan hari Tua, Pembayaran Jamsistek dan Pembayaran Uang Pensiun.

Kantor pusat Bank BTPN beralamat di Menara BTPN CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 – Indonesia. Bank BTPN memiliki 85 kantor cabang utama, 746 kantor cabang pembantu, 148 kantor pembayaran dan 140 kantor fungsional operational. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, yaitu: Sumitomo Mitsui Banking Corporation

(pengendali) (40%), TPG Nusantara (pengendali) (8,38%) dan Summit Global Capital Management B.V (20%).

Pemegang saham pengendali terakhir adalah Sumitomo Mitsui Financial Group melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan David Bonderman melalui TPG Nusantara. Pada tanggal 29 Februari 2008, BTPN memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BTPN (IPO) kepada masyarakat sebanyak 267.960.220 dengan nominal Rp.100,- per saham dengan harga penawaran Rp.2.850,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 Maret 2008.

9. PT. Bank Victoria Internasional, Tbk

PT. Bank Victoria Internasional Tbk (Bank Victoria) pertama kali didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1992 sebagai bank umum swasta. Kini, mayoritas saham Bank Victoria dipegang oleh PT. Victoria Investama Tbk sebesar 45,43% berdasarkan posisi 31 Januari 2018. Kegiatan operasional Bank Victoria diawali dengan mengembangkan misi utamanya yaitu memberikan kualitas layanan yang terbaik kepada para nasabah secara konsisten dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Seiring dengan upaya untuk terus memperbaiki pengelolaan risiko dan keuangannya, Bank Victoria senantiasa bergerak secara agresif dalam mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki loyalitas tinggi pada perusahaan, mengembangkan teknologi informasi dan jaringan kantor, serta berprinsip

dan berdedikasi dengan mendukung pengembangan kemampuan pribadi yang didukung dengan penerapan prinsip GCG (Good Corporate Governance).

Pada tahun 1999, Bank Victoria telah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Sejak saat itu Bank Victoria aktif melaksanakan berbagai aksi korporasi, seperti penawaran umum terbatas dan menerbitkan Obligasi. Pada tahun 2007, Bank Victoria menerbitkan Obligasi II dan Obligasi rendah I, masing-masing bernilai Rp.200 miliar. Kemudian di tahun 2008, Bank Victoria telah melakukan penawaran umum terbatas (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD) IV senilai Rp.116.75 triliun dengan penerbitan Surat Berharga Seri V bernilai 63.04 triliun. Pada tahun 2011, Bank Victoria telah menambahkan modal melalui penawaran umum terbatas tanpa HMETD sebesar 58 triliun, HMETD sebesar Rp. 195 milyar, Exercise Warrant sebesar Rp. 8 milyar. Selain itu, di tahun 2012 dan 2013, Bank Victoria menerbitkan Obligasi III dan IV dengan nilai masing-masing Rp.200 milyar dan Obligasi Rendah II dan III dengan nilai masing-masing Rp.300 milyar. Pada akhir tahun 2016, Bank menambah modal melalui penambahan tanpa HMETD senilai Rp.277,6 miliar dari investor baru, yaitu DEG (*Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft*).

Kantor pusat Bank Victoria berlokasi di Panin Tower – Senayan City, Lantai 15, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270 – Indonesia. Saat ini, Bank Victoria memiliki kantor cabang utama, 8 kantor cabang, 67 kantor cabang pembantu dan 27 kantor kas. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Victoria Internasional Tbk, yaitu: Victoria Investama Tbk

(45,43%), Suzanna Tanojo (10,17%) dan DEG Deutsche Invenstitutions und Entwicklungsgesellschaft mbH (9,00%). Pada tanggal 04 Juni 1999, Bank Victoria memperoleh pernyataan efektif dari Menteri Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) kepada masyarakat sebanyak 250.000.000 dengan nilai nominal Rp.100,- per saham dengan harga penawaran Rp.100,- per saham dan disertai 80.000.000 Waran seri I. Saham dan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (VEI) pada tanggal 30 Juni 1999.

10. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten, Tbk

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank Jabar Banten/Bank BJB) didirikan pada tanggal 08 April 1999. Bank BJB sebelumnya merupakan sebuah perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dinasionalisasi pada tahun 1960 yaitu N.V. Denis (De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding) dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 20 Mei 1961. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menjadi bank devisa sejak tanggal 2 Agustus 1990. Pendirian BPD Jawa Barat dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33/1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi.

Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi adalah N.V. Denis (De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding, sebuah bank hipotek. Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya PP tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Akta

Notaris Noezar Nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan Nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 21 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari kas daerah sebesar Rp.2.500.000,-.

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22/1998 dan akta pendirian nomor 4 tanggal 8 April 1999 berikut akta perbaikan nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Kantor pusat Bank BJB berlokasi di Menara Bank BJB, Jl. Naripan No. 12-14, Bandung 40111 – Indonesia. Saat ini, Bank BJB memiliki 63 kantor vabang, 311 kantor cabang pembantu, 337 kantor kas, 142 payment point. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank BJB

adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Selain kegiatan perbankan, Bank BJB juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Bank BJB, atau Bank BJB sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR.

Pada tanggal 29 Juni 2010, Bank BJB memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana atas 2.424.072.500 Saham Seri B dengan nominal Rp.250,- per saham dan harga penawaran Rp.600,- per saham. Bank BJB telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 Juli 2010.

11. PT. Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya O.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah ditengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketigas terbesar berdasarkan asset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan

Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip Syariah.

12. PT. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkenal dampak krisis.

BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking sistem). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya

di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Per Desember 2016 Bank Syariah Mandiri memiliki 765 kantor layanan di seluruh Indonesia, 996 unit ATM Syariah Mandiri dengan akses lebih dari 100.000 jaringan ATM.

13. PT. Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (USS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu, nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor

Cabang BNI Konvensional (office channeling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selama pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketahui oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009.

Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak dan 20 payment point. Dari awal beroperasi hingga kini, BNI Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

14. PT. Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah perseorangan, mikro, kecil dan menengah. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT. Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT. Bank UIB menjadi PT. Bank BCA Syariah. Akta

perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT. Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT. BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah. Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi HALO BCA di 1500888. BCA Syariah hingga saat ini memiliki 49 jaringan cabang yang terdiri dari 9 Kantor Cabang (KC), 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Cabang Pembantu Mikro Bina Usaha Rakyat (BUR), 8 Kantor Fungsional (KF) dan 26 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor,

Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo dan Yogyakarta (data per Agustus 2016).

15. PT. Maybank Syariah Indonesia

Bank Maybank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan berjenis perbankan di Indonesia. Bank ini dahulu bernama Bank Maybank Indocorp merupakan bank *joint venture* antara Maybank dengan Bank Nusa Nasional. Sejak tahun 2010 telah berubah menjadi bank syariah. PT. Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) adalah bank umum syariah yang beroperasi di jantung kota Jakarta sejak 11 Oktober 2010 melalui konversi PT. Bank Maybank Indocorp menjadi bank syariah. PT. Bank Maybank Indocorp merupakan bank patungan Malaysia-Indonesia pertama yang didirikan tahun 1995. Pemegang 99% saham kepemilikan Maybank Syariah adalah Malayan Banking Berhad (Maybank Group), penyedia jasa keuangan terbesar di Malaysia dengan total asset lebih dari USD 160 milyar sekaligus korporasi dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Saham Malaysia.

Maybank Group melalui anak perusahaannya Maybank Islamic Berhad merupakan bank umum syariah terbesar di Asia Pasifik serta termasuk dalam Top 20 institusi keuangan syariah dunia. Maybank Syariah membawa serta kemampuan dan keahlian Maybank Group dan juga pengalaman selama 18 tahun di Indonesia dalam menyediakan solusi keuangan yang terbaik untuk para nasabah. pemegang saham PT. Bank Maybank Syariah Indonesia adalah Malayan Banking Berhad (99%) dan PT. Prosperindo (1%). Maybank Syariah menorehkan pencapaian yang cukup solid di tahun 2012, antara lain

dengan paripurnanya proses konversi PT. Bank Maybank Syariah Indonesia menjadi bank umum syariah, serta pertumbuhan bisnis diatas fondasi yang cukup baik sebagaimana tercermin pada laporan kinerja keuangan utama. Maybank Syariah hadir dan melayani masyarakat di seluruh Indonesia melalui 7 Kantor Cabang Syariah (KCS) dan Layanan Syariah (LS) di seluruh kantor cabang Maybank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan Syariah.

16. PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Berawal dari PT. Bank Umum Tugu (Bank Tugu), bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melali Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT. Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengorvensi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004.

Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Pada 25 Agustus 2004, Bank Syariah Mega Indonesia resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007,

pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo Bank Syariah Mega Indonesia ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT. Bank Mega, Tbk tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12.75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT. Bank mega Syariah. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional.

Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia. Selain itu, pada 8 April 2009 Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia. Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja yang tersebar di Jabodetabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan dan Sulawesi.

17. PT. Bank Syariah Bukopin

PT. Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT. Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT. Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT. Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT. Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT. Bank Swansarindo Internasional menjadi PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT. Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT. Bank Bukopin, Tbk., maka pada

tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT. Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT. Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.

Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) kantor pusat dan operasional, 11 (sebelas) kantor cabang, 7 (tujuh) kantor cabang pembantu, 4 (empat) kantor kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) kantor layanan syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

18. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Bank BTPN Syariah adalah Bank Umum Syariah ke 12 di Indonesia, memiliki tekad untuk menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik. Bank BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu PT. Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakusisi oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), pada 20

Januari 2014 dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di *spin off* dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014.

19. PT. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT. Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968.

Selanjutnya, PT. Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT. Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Penyertaan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-

02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT. Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.0110-16130 tanggal 29 Juni 2010. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99,99%.

20. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Syariah

Pendirian Bank Jabar Banten Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten, Tbk. Pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh)

tahun operasional Divisi/Unit Usaha Syariah, manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan Bank BJB Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang menjadi cikal bakal Bank BJB Syariah.

Kemudian, pada tanggal 21 Juni 2011 berdasarkan Akta Nomor 10 Tentang Penambahan Modal Disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT. Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar

Rp. 7000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp. 495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT. Banten Global Development sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RPUS Lainnya Tahun 2012, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT. Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT. Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp. 609.000.000.000 (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp. 595.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT. Banten Global Development sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah). Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H.,M.kn, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH-04317.AH.01.10-10438. Hingga saat ini Bank BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No. 135, dan telah memiliki 8 kantor cabang, 44 kantor cabang pembantu, 54 jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan

49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan Bank BJB Syariah semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

C. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk memperlihatkan beberapa informasi yang terdapat dalam ringkasan kinerja Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016, berikut penyajian data yang akan menjelaskan rasio-rasio yang digunakan sebagai variabel penelitian:

a. Bank Umum Konvensional

1. Rasio *Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio* (LDR/FDR)

Penelitian ini menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Berikut penyajian data LDR Bank Umum Konvensional:

Tabel 4.1 Data LDR Bank Umum Konvensional

Nama Bank Umum Konvensional	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	88,54	81,68	86,88	87,77
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	82,97	82,02	87,05	85,86
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	85,3	87,8	87,8	90,4
PT. Bank Central Asia, Tbk	75,4	76,8	81,1	77,1
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	87,04	92,67	86,14	88,92
PT. Bank Mega, Tbk	57,41	65,85	65,05	55,35
PT. Bank Bukopin, Tbk	85,8	83,89	86,34	86,04
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	88	97	97	95
PT. Bank Victoria International, Tbk	73,39	70,25	70,17	68,38
PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	96,47	93,18	88,13	86,7
Rata-rata (<i>mean</i>)	82,03	83,11	83,57	82,15
Nilai Terendah (<i>min</i>)	57,41	65,85	65,05	55,35
Nilai Tertinggi (<i>max</i>)	96,47	97	97	95

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh oleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 57,41% pada tahun 2013, sebesar 65,85% pada tahun 2014, sebesar 65,05% pada tahun 2015, dan sebesar 55,35% pada tahun 2016 dimana semua nilai terendah tersebut dicapai oleh Bank Mega. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 96,47% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank Jabar Banten, sebesar 97% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank BTPN, sebesar 97% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank BTPN, dan sebesar 95% pada tahun 2016 yang dicapai oleh Bank BTPN.

Berdasarkan rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio LDR terus mengalami peningkatan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, namun pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan sekitar 1,42%. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio LDR Bank Umum Konvensional sudah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 78% - 92%, karena selama tahun 2013-2016 rasio LDR Bank Umum Konvensional mencapai 82%-83%.

2. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Penelitian ini menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk mengukur kecukupan modal yang berguna untuk menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit. Berikut ini penyajian data CAR Bank Umum Konvensional:

Tabel 4.2 Data CAR Bank Umum Konvensional

Nama Bank Umum Konvensional	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	16,99	18,31	20,59	22,91
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	14,93	16,6	18,6	21,36
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15,1	16,2	19,5	19,4
PT. Bank Central Asia, Tbk	15,7	16,9	18,7	21,9
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	12,74	15,76	15,17	16,77
PT. Bank Mega, Tbk	15,74	15,23	22,85	26,21
PT. Bank Bukopin, Tbk	15,12	14,21	13,56	15,03
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	23,1	23,2	23,8	25
PT. Bank Victoria International, Tbk	17,95	18,35	19,3	24,58
PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	16,51	16,08	16,21	18,43
Rata-rata	16,39	17,08	18,83	21,16
Nilai Terendah	12,74	14,21	13,56	15,03
Nilai Tertinggi	23,1	23,2	23,8	26,21

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 12,74% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank Maybank Indonesia, sebesar 14,21% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank Bukopin, sebesar 13,56% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank Bukopin, dan sebesar 15,03% pada tahun 2016 yang dicapai oleh Bank Bukopin. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 23,1% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank BTPN, sebesar 23,2% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank BTPN, sebesar 23,8% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank BTPN, dan sebesar 26,21% pada tahun 2016 yang dicapai Bank Mega.

Berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio CAR terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut

mencerminkan bahwa Bank Umum Konvensional mampu meningkatkan permodalan setiap tahunnya guna menghadapi kemungkinan resiko kerugian yang terjadi. Karena menurut teori, semakin besar rasio CAR maka mencerminkan kemampuan bank yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio CAR Bank Umum Konvensional sudah memenuhi standar BI yaitu minimal 8%, karena rasio CAR Bank Umum Konvensional mencapai 16-21%.

3. Rasio *Return on Assets* (ROA)

Penelitian ini menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimilikinya. Berikut ini penyajian data rasio ROA Bank Umum Konvensional:

Tabel 4.3 Data ROA Bank Umum Konvensional

Nama Bank Umum Konvensional	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	5,03	4,73	4,19	3,84
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	3,66	3,57	3,15	1,9
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3,4	3,5	2,6	2,7
PT. Bank Central Asia, Tbk	3,8	3,9	3,8	4
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	1,64	0,69	1,08	1,6
PT. Bank Mega, Tbk	1,14	1,16	1,97	2,36
PT. Bank Bukopin, Tbk	1,78	1,23	1,39	1,38
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	4,5	3,6	3,1	3,1
PT. Bank Victoria International, Tbk	1,97	0,8	0,65	0,52
PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	2,61	1,92	2,04	2,22
Rata-rata	2,95	2,51	2,40	2,36
Nilai Terendah	1,14	0,69	0,65	0,52
Nilai Tertinggi	5,03	3,9	4,19	4

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 1,14% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank Mega, sebesar 0,69% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank Maybank Indonesia, sebesar 0,65% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank Victoria, dan sebesar 0,52% pada tahun 2016 yang dicapai oleh Bank Victoria. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 5,03% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank BRI, sebesar 3,9% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank BCA, sebesar 4,19% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank BRI, dan sebesar 4% pada tahun 2016 yang dicapai Bank BCA.

Berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio ROA terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurunnya kinerja rasio ROA mencerminkan bahwa kurangnya pengelolaan terhadap aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba, sehingga dapat berdampak pada menurunnya laba yang diperoleh. Karena menurut teori, semakin tinggi rasio ROA mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat laba yang diperoleh dan semakin baik bank tersebut dalam menggunakan asetnya guna menghasilkan laba. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio ROA Bank Umum Konvensional sudah memenuhi standar BI yaitu sebesar 1,5%, karena rasio ROA Bank Umum Konvensional mencapai 2% bahkan hampir mencapai 3%.

4. Rasio *Return on Equity* (ROE)

Penelitian ini menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE) untuk mengukur sejauh mana suatu bank mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan laba atas ekuitas yang dimiliki. Berikut penyajian data ROE Bank Umum Konvensional:

Tabel 4.4 Data ROE Bank Umum Konvensional

Nama Bank Umum Konvensional	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	34,11	31,19	29,89	23,08
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	27,31	25,81	23,03	11,12
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22,5	23,6	17,2	15,5
PT. Bank Central Asia, Tbk	28,2	25,5	21,9	20,5
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	16,42	6,1	8,47	11,85
PT. Bank Mega, Tbk	9,65	10,05	15,2	10,91
PT. Bank Bukopin, Tbk	19,44	11,53	14,8	13,19
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	26,2	18,6	14,1	12,6
PT. Bank Victoria International, Tbk	16,72	7,62	6,73	4,79
PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	26,76	18,92	23,05	21,81
Rata-rata	22,73	17,89	17,44	14,53
Nilai Terendah	9,65	6,1	6,73	4,79
Nilai Tertinggi	34,11	31,19	29,89	23,08

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 9,65% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank Mega, sebesar 6,1% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank Maybank Indonesia, sebesar 6,73% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank Victoria, dan sebesar 4,79% pada tahun 2016 yang dicapai oleh Bank Victoria. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 34,11% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank BRI, sebesar 31,19% pada tahun 2014

yang dicapai oleh Bank BRI, sebesar 29,89% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank BRI, dan sebesar 23,08% pada tahun 2016 yang dicapai Bank BRI.

Berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio ROE terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurunnya kinerja pada rasio ROE, mengindikasikan bahwa menurunnya kemampuan bank dalam menghasilkan laba atas ekuitas dan hal tersebut mampu membuat nilai perusahaan ikut menurun. Karena menurut teori semakin tinggi nilai ROE mengindikasikan bahwa semakin baik bank tersebut dalam menghasilkan laba atas ekuitas yang dimiliki dan nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ikut meningkat. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio ROE Bank Umum Konvensional sudah memenuhi standar BI yaitu diatas 12%, karena rasio ROE Bank Umum Konvensional mencapai 14% sampai dengan 22%.

5. Rasio Beban Operasioal terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Penelitian ini menggunakan rasio BOPO untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Berikut penyajian data rasio BOPO Bank Umum Konvensional:

Tabel 4.5 Data BOPO Bank Umum Konvensional

Nama Bank Umum Konvensional	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	60,58	65,42	67,96	68,93
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	62,4	64,98	69,67	80,94
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	67,1	69,8	75,5	73,6
PT. Bank Central Asia, Tbk	61,5	62,4	63,2	60,4
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	83,06	92,13	89,18	84,36
PT. Bank Mega, Tbk	89,76	91,25	85,72	81,81
PT. Bank Bukopin, Tbk	82,38	89,21	87,56	86,97
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	75	80	82	82
PT. Bank Victoria International, Tbk	81,35	93,25	93,89	94,3
PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	79,41	85,6	83,31	82,7
Rata-rata	74,25	79,40	79,80	79,60
Nilai Terendah	60,58	62,4	63,2	60,4
Nilai Tertinggi	89,76	93,25	93,89	94,3

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 60,58% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank BRI, sebesar 62,4% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank BCA, sebesar 63,2% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank BCA, dan sebesar 60,4% pada tahun 2016 yang dicapai oleh Bank BCA. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 89,76% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank Mega, sebesar 93,25% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank Victoria, sebesar 93,89% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank Victoria, dan sebesar 94,3% pada tahun 2016 yang dicapai Bank Victoria.

Berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio BOPO terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan terjadi pada rasio

BOPO tidak baik bagi bank, karena menurut teori semakin rendah rasio BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio BOPO Bank Umum Konvensional sudah memenuhi standar BI yaitu dibawah 92%, karena rasio BOPO Bank Umum Konvensional mencapai 74% - 79%.

6. Rasio *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (NPL/NPF)

Penelitian ini menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) untuk mengukur seberapa besar tingkat kredit bermasalah yang disalurkan kepada nasabah. Berikut penyajian data NPL Bank Umum Konvensional:

Tabel 4.6 Data NPL Bank Umum Konvensional

Nama Bank Umum Konvensional	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	1,55	1,69	2,02	2,03
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	1,6	1,66	2,29	3,96
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2,2	2	2,7	3
PT. Bank Central Asia, Tbk	0,4	0,6	0,7	1,3
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	2,11	2,23	3,67	3,42
PT. Bank Mega, Tbk	2,18	2,29	2,81	3,44
PT. Bank Bukopin, Tbk	2,25	2,78	2,83	3,77
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	0,67	0,7	0,7	0,79
PT. Bank Victoria International, Tbk	0,7	3,52	4,48	3,89
PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	2,83	4,15	2,91	1,69
Rata-rata	1,65	2,16	2,51	2,73
Nilai Terendah	0,4	0,6	0,7	0,79
Nilai Tertinggi	2,83	4,15	4,48	3,89

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 0,4% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank BCA, sebesar 0,6% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank BCA, sebesar 0,7% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank BCA, dan sebesar 0,79% pada tahun 2016 yang dicapai

oleh Bank BTPN. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 2,83% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank Jabar Banten, sebesar 4,15% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank Victoria, sebesar 4,48% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank Victoria, dan sebesar 3,89% pada tahun 2016 yang dicapai Bank Victoria.

Berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio NPL terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang terjadi dapat membuat Bank Umum Konvensional berada dikondisi yang tidak sehat, karena menurut teori apabila rasio NPL tinggi akan menyebabkan laba yang diterima oleh bank akan menurun akibat adanya kredit bermasalah. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio NPL Bank Umum Konvensional sudah memenuhi standar BI yaitu maksimal 5%, karena rasio NPL Bank Umum Konvensional hanya sebesar 1% sampai 2%.

b. Bank Umum Syariah

1. Rasio *Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio* (LDR/FDR)

Penelitian ini menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Berikut penyajian data FDR Bank Umum Syariah:

Tabel 4.7 Data FDR Bank Umum Syariah

Nama Bank Umum Syariah	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank BRI Syariah	102,7	93,9	84,16	81,42
PT. Bank Syariah Mandiri	89,37	82,13	81,99	79,19
PT. Bank BNI Syariah	97,86	92,6	91,94	84,57
PT. Bank BCA Syariah	83,5	91,2	91,4	90,1
PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	152,87	157,77	110,54	134,73
PT. Bank Syariah Mega Indonesia	93,37	93,61	98,49	95,24
PT. Bank Syariah Bukopin	100,29	92,89	90,56	88,18
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	149,87	93,97	96,54	92,75
PT. Bank Victoria Syariah	84,65	95,19	95,29	100,67
PT. B.P.D Jawa Barat dan Banten Syariah	97,4	84,02	104,75	98,73
Rata-rata	105,19	97,73	94,57	94,56
Nilai Terendah	83,5	82,13	81,99	79,19
Nilai Tertinggi	152,87	157,77	110,54	134,73

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 83,5% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank BCA Syariah, sebesar 82,13% pada tahun 2014 yang diperoleh Bank Syariah Mandiri, sebesar 81,99% pada tahun 2015 yang diperoleh Bank Syariah Mandiri, dan sebesar 79,19% pada tahun 2016 yang diperoleh Bank Syariah Mandiri. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 152,87% pada tahun 2013, sebesar 157,77% pada tahun 2014, sebesar 110,54% pada tahun 2015, dan sebesar 134,73% pada tahun 2016 dimana semuanya dicapai oleh Bank Maybank Syariah Indonesia.

Berdasarkan rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio FDR terus menurun selama tahun 2013 sampai tahun 2016. Menurunnya tingkat rasio FDR membuat Bank Umum Syariah menjadi semakin likuid, karena menurut

teori semakin tinggi rasio FDR maka semakin rendah tingkat likuidasi bank tersebut. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio FDR Bank Umum Syariah belum memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 78%-92%, karena selama tahun 2013-2016 rasio FDR Bank Umum Syariah mencapai 94%-105%.

2. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Penelitian ini menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk mengukur kecukupan modal yang berguna untuk menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian pembiayaan. Berikut ini penyajian data CAR Bank Umum Syariah:

Tabel 4.8 Data CAR Bank Umum Syariah

Nama Bank Umum Syariah	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank BRI Syariah	14,49	12,89	13,94	20,63
PT. Bank Syariah Mandiri	14,1	14,12	12,85	14,01
PT. Bank BNI Syariah	11,42	12	11,47	10,27
PT. Bank BCA Syariah	22,4	29,6	34,3	36,7
PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	59,41	52,13	38,4	55,06
PT. Bank Syariah Mega Indonesia	12,99	19,26	18,74	23,53
PT. Bank Syariah Bukopin	11,1	14,8	16,31	17
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	58,67	33,88	19,93	23,8
PT. Bank Victoria Syariah	18,4	15,27	16,14	15,98
PT. B.P.D Jawa Barat dan Banten Syariah	17,99	15,78	22,53	18,25
Rata-rata	24,10	21,97	20,46	23,52
Nilai Terendah	11,1	12	11,47	10,27
Nilai Tertinggi	59,41	52,13	38,4	55,06

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 11,1% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank Syariah Bukopin, sebesar 12% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank BNI Syariah, sebesar 11,47%

pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank BNI Syariah, dan sebesar 10,27% pada tahun 2016 yang dicapai oleh Bank BNI Syariah. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 59,41% pada tahun 2013, sebesar 52,13% pada tahun 2014, sebesar 38,4% pada tahun 2015, dan sebesar 55,06% pada tahun 2016 dimana semuanya dicapai oleh Bank Maybank Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio CAR masih mengalami fluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa Bank Umum Syariah masih kurang baik dalam menjaga pengelolaan permodalan yang dimiliki setiap tahunnya yang nantinya dapat membuat ketidaksiapan bank dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian yang terjadi. Karena menurut teori semakin besar rasio CAR maka mencerminkan kemampuan bank yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio CAR Bank Umum Syariah sudah memenuhi standar BI yaitu minimal 8%, karena rasio CAR Bank Umum Syariah mencapai 20-24%.

3. Rasio *Return on Assets* (ROA)

Penelitian ini menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimilikinya. Berikut ini penyajian data rasio ROA Bank Umum Syariah:

Tabel 4.9 Data ROA Bank Umum Syariah

Nama Bank Umum Syariah	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank BRI Syariah	1,15	0,08	0,77	0,95
PT. Bank Syariah Mandiri	1,53	-0,04	0,56	0,59
PT. Bank BNI Syariah	1,37	1,27	1,43	1,44
PT. Bank BCA Syariah	1	0,8	1	1,1
PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	2,87	3,61	-20,13	-9,51
PT. Bank Syariah Mega Indonesia	2,33	0,29	0,3	2,63
PT. Bank Syariah Bukopin	0,69	0,27	0,79	0,76
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	0,11	4,23	5,24	8,98
PT. Bank Victoria Syariah	0,5	-1,87	-2,36	-2,19
PT. B.P.D Jawa Barat dan Banten Syariah	0,91	0,72	0,25	-8,09
Rata-rata	1,25	0,94	-1,21	-0,33
Nilai Terendah	0,11	-1,87	-20,13	-9,51
Nilai Tertinggi	2,87	4,23	5,24	8,98

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh Bank Umum Konvensional selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 0,11% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank BTPN Syariah, sebesar -1,87% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank Victoria Syariah, sebesar -20,13% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank Maybank Syariah Indonesia, dan sebesar -9,51% pada tahun 2016 yang dicapai oleh Bank Maybank Syariah Indonesia. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 2,87% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank Maybank Syariah Indonesia, sebesar 4,23% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank BTPN Syariah, sebesar 5,24% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank BTPN Syariah, dan sebesar 8,89% pada tahun 2016 yang dicapai Bank BTPN Syariah.

Berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio

ROA terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurunnya kinerja rasio ROA mencerminkan bahwa kurangnya pengelolaan terhadap aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba, sehingga dapat berdampak pada menurunnya laba yang diperoleh. Karena menurut teori semakin tinggi rasio ROA mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh dan semakin baik bank tersebut dalam menggunakan asetnya guna menghasilkan laba. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio ROA Bank Umum Syariah belum memenuhi standar BI yaitu sebesar 1,5%, karena rasio ROA Bank Umum Syariah terus berada dibawah 1,5%.

4. Rasio *Return on Equity* (ROE)

Penelitian ini menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE) untuk mengukur sejauh mana suatu bank mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan laba atas ekuitas yang dimiliki. Berikut penyajian data ROE Bank Umum Syariah:

Tabel 4.10 Data ROE Bank Umum Syariah

Nama Bank Umum Syariah	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank BRI Syariah	10,2	0,44	6,33	7,4
PT. Bank Syariah Mandiri	15,34	-0,94	5,92	5,81
PT. Bank BNI Syariah	9,65	10,83	11,39	11,94
PT. Bank BCA Syariah	4,3	2,9	3,1	3,5
PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	5,05	6,83	-32,04	-27,62
PT. Bank Syariah Mega Indonesia	26,23	2,5	1,61	11,97
PT. Bank Syariah Bukopin	7,63	2,39	5,35	5,15
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	0,1	13,75	17,89	31,71
PT. Bank Victoria Syariah	3,7	-17,61	-15,06	-17,45
PT. B.P.D Jawa Barat dan Banten Syariah	4,65	3,73	0,92	-49,05
Rata-rata	8,68	2,48	0,54	-1,66
Nilai Terendah	0,1	-17,61	-32,04	-49,05
Nilai Tertinggi	26,23	13,75	17,89	31,71

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 0,1% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank BTPN Syariah, sebesar -17,61% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank Victoria Syariah, sebesar -32,04% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank Maybank Syariah Indonesia, dan sebesar -49,05% pada tahun 2016 yang dicapai oleh Bank Jabar Banten Syariah. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 26,23% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank Mega Syariah, sebesar 13,75% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank BTPN Syariah, sebesar 17,89% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank BTPN Syariah, dan sebesar 31,71% pada tahun 2016 yang dicapai Bank BTPN Syariah,

Berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio ROE terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurunnya kinerja pada rasio ROE, mengindikasikan bahwa menurunnya kemampuan bank dalam menghasilkan laba atas ekuitas dan hal tersebut mampu membuat nilai perusahaan ikut menurun. Karena menurut teori semakin tinggi nilai ROE mengindikasikan bahwa semakin bank tersebut dalam menghasilkan laba atas ekuitas yang dimiliki dan nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ikut meningkat. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio ROE Bank Umum Syariah belum memenuhi standar BI

yaitu diatas 12%, karena rasio ROE Bank Umum Syariah hanya mencapai 8% sampai dengan -1%.

5. Rasio Beban Operasioal terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Penelitian ini menggunakan rasio BOPO untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Berikut penyajian data rasio BOPO Bank Umum Syariah:

Tabel 4.11 Data BOPO Bank Umum Syariah

Nama Bank Umum Syariah	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank BRI Syariah	90,42	99,77	93,79	91,33
PT. Bank Syariah Mandiri	73,34	85,1	79,46	78
PT. Bank BNI Syariah	88,11	89,8	89,63	87,67
PT. Bank BCA Syariah	90,2	92,9	92,5	92,2
PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	67,79	69,62	192,6	160,28
PT. Bank Syariah Mega Indonesia	86,03	97,61	99,51	88,16
PT. Bank Syariah Bukopin	92,29	96,77	91,99	91,76
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	98,87	85,92	85,82	75,14
PT. Bank Victoria Syariah	91,95	143,31	119,19	131,34
PT. B.P.D Jawa Barat dan Banten Syariah	85,76	91,01	98,78	122,77
Rata-rata	86,48	95,18	104,33	101,86
Nilai Terendah	67,79	69,62	79,46	75,14
Nilai Tertinggi	98,87	143,31	192,6	160,28

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 67,79% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank Maybank Syariah Indonesia, sebesar 69,62% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank Maybank Syariah Indonesia, sebesar 79,46% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank Syariah Mandiri, dan sebesar 75,14% pada tahun 2016 yang dicapai oleh Bank BTPN Syariah. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 98,87% pada tahun 2013 yang

dicapai oleh Bank BTPN Syariah, sebesar 143,31% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank Victoria Syariah, sebesar 192,6% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank Maybank Syariah Indonesia, dan sebesar 160,28% pada tahun 2016 yang dicapai Bank Maybank Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio BOPO terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan terjadi pada rasio BOPO tidak baik bagi bank, karena menurut teori semakin rendah rasio BOPO menunjukkan semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio BOPO Bank Umum Syariah hanya pada tahun 2013 yang memenuhi standar BI yaitu dibawah 92%, karena pada tahun 2014-2016 mencapai 95% sampai dengan 101%.

6. Rasio *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (NPL/NPF)

Penelitian ini menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk mengukur seberapa besar tingkat pembiayaan bermasalah yang disalurkan kepada nasabah. Berikut penyajian data NPF Bank Umum Syariah:

Tabel 4.12 Data NPF Bank Umum Syariah

Nama Bank Umum Syariah	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PT. Bank BRI Syariah	1,86	6,84	2,53	2,94
PT. Bank Syariah Mandiri	4,32	4,6	6,06	4,92
PT. Bank BNI Syariah	4,06	0,1	4,86	4,47
PT. Bank BCA Syariah	0,1	5,04	0,7	0,5
PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	2,69	3,89	35,15	43,99
PT. Bank Syariah Mega Indonesia	2,98	4,07	4,26	3,3
PT. Bank Syariah Bukopin	4,27	1,29	2,99	3,17
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2,94	7,1	1,25	1,53
PT. Bank Victoria Syariah	3,71	7,1	9,8	7,31
PT. B.P.D Jawa Barat dan Banten Syariah	1,86	5,84	6,93	17,91
Rata-rata	2,88	4,59	7,45	9,00
Nilai Terendah	0,1	0,1	0,7	0,5
Nilai Tertinggi	4,32	6,84	35,15	43,99

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 0,1% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank BCA Syariah, sebesar 0,1% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank BNI Syariah, sebesar 0,7% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank BCA Syariah, dan sebesar 0,5% pada tahun 2016 yang dicapai oleh Bank BCA Syariah. Nilai tertinggi yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2016 adalah sebesar 4,32% pada tahun 2013 yang dicapai oleh Bank Syariah Mandiri, sebesar 6,84% pada tahun 2014 yang dicapai oleh Bank BRI Syariah, sebesar 35,15% pada tahun 2015 yang dicapai oleh Bank Maybank Syariah Indonesia, dan sebesar 43,99% pada tahun 2016 yang dicapai Bank Maybank Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) selama tahun 2013-2016 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio NPF terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang terjadi

dapat membuat Bank Umum Syariah berada dikondisi yang tidak sehat, karena menurut teori apabila rasio NPF tinggi akan menyebabkan laba yang diterima oleh bank akan menurun akibat adanya pembiayaan bermasalah. Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata (*mean*) pada rasio NPF Bank Umum Syariah hanya pada tahun 2013 dan 2014 yang memenuhi standar BI yaitu dibawah 5%.

D. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif menurut Sugiyono (2016:169) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*) dan nilai rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel yang digunakan. Berikut hasil statistik deskriptif yang telah diolah menggunakan SPSS:

Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Rasio Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Rasio	N	Bank Umum Konvensional			Bank Umum Syariah		
		Min (%)	Max (%)	Mean (%)	Min (%)	Max (%)	Mean (%)
LDR/FDR	40	55,35	97,00	82,72	79,19	157,77	98,01
CAR	40	12,74	26,21	18,36	10,27	59,41	22,51
ROA	40	0,52	5,03	2,56	-20,13	8,89	0,15
ROE	40	4,79	34,11	18,15	-49,05	31,71	2,51
BOPO	40	60,40	94,30	78,26	67,79	192,60	96,96
NPL/NPF	40	0,40	4,48	2,26	0,10	43,99	5,85

Sumber: Data diolah, 2018

1. LDR/FDR (*Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio*)

Berdasarkan hasil statistik yang terdapat pada tabel 4.13, dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini (N) adalah sebanyak 40 data. Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa untuk rasio LDR pada Bank Umum Konvensional nilai minimumnya adalah sebesar 55,35% yaitu berada pada Bank Mega pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.1) dan nilai maksimumnya adalah sebesar 97,00% yaitu berada pada Bank BTPN tahun 2014 dan 2015 (terdapat pada tabel 4.1). Nilai *mean* (rata-rata) dari Bank Umum Konvensional adalah sebesar 82,72%. Sedangkan untuk nilai minimum pada Bank Umum Syariah adalah sebesar 79,19% yaitu pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.7) dan nilai maksimumnya adalah sebesar 157,77% pada Bank Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2014 (terdapat pada tabel 4.7). *Mean* pada Bank Umum Syariah adalah sebesar 98,01%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk rasio LDR/FDR apabila dilihat dari hasil *mean* yang diperoleh, FDR Bank Umum Syariah lebih tinggi yaitu sebesar 98,01% dibandingkan dengan LDR Bank Umum Konvensional yang memiliki *mean* sebesar 82,72%.

Maka dapat disimpulkan bahwa selama periode 2013 – 2016 kinerja Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio LDR/FDR lebih baik dibandingkan Bank Umum Syariah. FDR Bank Umum Syariah belum memenuhi standar LDR/FDR dari Bank Indonesia yaitu sebesar 78% - 92%, sedangkan LDR Bank Umum Konvensional sudah memenuhi standar yang

ditentukan karena *mean* dari Bank Umum Konvensional hanya sebesar 82,72% sedangkan *mean* Bank Umum Syariah mencapai 98,01%. Dari hasil *mean* tersebut dapat mencerminkan bahwa Bank Umum Konvensional memiliki tingkat likuiditas yang lebih baik daripada Bank Umum Syariah.

2. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa pada rasio CAR nilai minimum dari Bank Umum Konvensional adalah sebesar 12,74% yaitu pada Bank Maybank Indonesia pada tahun 2013 (terdapat pada tabel 4.2) dan untuk nilai maksimumnya adalah sebesar 26,21% yaitu pada Bank Mega pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.2). Nilai *mean* dari Bank Umum Konvensional adalah sebesar 18,36%. Rasio CAR pada Bank Umum Syariah nilai minimumnya adalah sebesar 10,27% yaitu pada Bank BNI Syariah pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.8) dan nilai maksimumnya adalah sebesar 59,41% yaitu pada Bank Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2013 (terdapat pada tabel 4.8). Nilai *mean* dari Bank Umum Syariah adalah sebesar 22,51%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila ditinjau dari nilai *mean* yang diperoleh, nilai *mean* dari rasio CAR Bank Umum Syariah yaitu sebesar 22,51% lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Konvensional yang hanya memiliki nilai *mean* sebesar 18,36%.

Maka dapat disimpulkan bahwa selama periode 2013 – 2016 kinerja Bank Umum Syariah berdasarkan rasio CAR lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional, karena menurut teori semakin tinggi rasio CAR yang diperoleh maka semakin bagus kualitas permodalan yang dimiliki bank

tersebut. Maka dalam pengelolaan modal yang ada, Bank Umum Syariah lebih baik dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian yang ada. Namun apabila melihat pada ketentuan dari Bank Indonesia yaitu standar CAR yang baik adalah sebesar 8%, maka Bank Umum Konvensional sudah memiliki CAR yang ideal karena berada diatas 8%.

3. ROA (*Return on Assets*)

Berdasarkan tabel 4.13 pada rasio ROA, nilai minimum yang dimiliki Bank Umum Konvensional adalah sebesar 0,52% yaitu pada Bank Victoria pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.3) dan nilai maksimumnya adalah sebesar 5,03% pada Bank BRI pada tahun 2013 (terdapat pada tabel 4.3). *Mean* dari Bank Umum Konvensional adalah sebesar 2,56%. Pada dari rasio ROA Bank Umum Syariah, nilai minimumnya adalah sebesar -20,13 yaitu pada Bank Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2015 (terdapat pada tabel 4.9) dan nilai maksimumnya adalah 8,98% yaitu pada Bank BTPN Syariah pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.9). Nilai *mean* dari Bank Umum Syariah adalah sebesar 0,15%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai *mean* Bank Umum Konvensional sebesar 2,56% lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *mean* Bank Umum Syariah yang hanya sebesar 0,15%.

Maka dapat disimpulkan bahwa selama periode 2013 – 2016, kinerja Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio ROA lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Umum Konvensional lebih baik dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan,

karena menurut teori semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh oleh bank tersebut serta Bank Umum Konvensional lebih baik dalam penggunaan aset-asetnya guna menghasilkan laba. Standar ROA berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia adalah sebesar 1,5%, maka rasio ROA pada Bank Umum Syariah masih belum berada di kondisi yang ideal karena *mean* dari Bank Umum Syariah hanya sebesar 0,15%.

4. ROE (*Return on Equity*)

Berdasarkan tabel 4.13 pada rasio ROE, nilai minimum dari Bank Umum Konvensional adalah 4,79% yaitu pada Bank Victoria pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.4) dan nilai maksimumnya sebesar 34,11% yaitu pada Bank BRI pada tahun 2013 (terdapat pada tabel 4.4). Nilai *mean* dari Bank Umum Konvensional adalah sebesar 18,15%. Pada rasio ROE Bank Umum Syariah, nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar -49,05% yaitu pada Bank Jabar Banten pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.10) dan nilai maksimumnya sebesar 31,71% yaitu pada Bank BTPN Syariah pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.10). Nilai *mean* dari Bank Umum Syariah adalah sebesar 2,51%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai *mean* dari rasio ROE Bank Umum Konvensional sebesar 18,15% lebih tinggi dibandingkan dengan *mean* Bank Umum Syariah yang hanya sebesar 2,51%.

Maka dapat dilihat bahwa selama periode 2013 – 2016 kinerja Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio ROE lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Syariah, karena menurut teori semakin tinggi rasio ROE yang

diperoleh maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Maka dalam rasio ini Bank Umum Konvensional lebih baik dalam memperoleh keuntungan dengan modal yang dimiliki, sehingga keuntungan yang diperoleh Bank Umum Konvensional mampu membuat nilai perusahaannya menjadi meningkat. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) Bank Umum Syariah belum memenuhi standar yang ada karena masih berada dibawah 12%.

5. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Berdasarkan tabel 4.13 pada rasio BOPO, nilai minimum dari Bank Umum Konvensional adalah sebesar 60,40% yaitu pada Bank BCA pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.5) dan nilai maksimum sebesar 94,30% yaitu pada Bank Victoria pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.5). Nilai *mean* dari Bank Umum Konvensional adalah sebesar 78,26%. Nilai minimum pada rasio BOPO Bank Umum Syariah adalah sebesar 67,79% yaitu pada Bank Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2013 (terdapat pada tabel 4.11) dan nilai maksimumnya adalah sebesar 192,60% yaitu pada Bank Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2015 (terdapat pada tabel 4.11). *Mean* dari Bank Umum Syariah adalah sebesar 96,96%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *mean* dari rasio BOPO Bank Umum Konvensional sebesar 78,26% lebih rendah dibandingkan dengan *mean* Bank Umum Syariah sebesar 96,96%.

Maka selama periode 2013 – 2016, kinerja Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio BOPO lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum

Syariah, karena menurut teori semakin kecil rasio BOPO yang diperoleh maka semakin efisien suatu bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Maka Bank Umum Konvensional lebih baik dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia standar BOPO yang baik adalah dibawah 92%, maka rasio BOPO pada Bank Umum Syariah masih belum masuk dalam kategori baik karena besar rasio BOPO Bank Umum Syariah adalah sebesar 96,96% sedangkan rasio BOPO Bank Umum Konvensional sudah termasuk dalam kategori baik karena sudah berada dibawah 92%.

6. NPL/NPF (*Non Performing Loan/Non Performing Financing*)

Berdasarkan tabel 4.13 nilai minimum pada rasio NPL/NPF Bank Umum Konvensional adalah sebesar 0,40% yaitu pada Bank BCA pada tahun 2013 (terdapat pada tabel 4.6) dan nilai maksimum sebesar 4,48% yaitu pada Bank Victoria pada tahun 2015 (terdapat pada tabel 4.6). *Mean* dari Bank Umum Konvensional adalah sebesar 2,26%. Pada rasio NPF Bank Umum Syariah, nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 0,10% yaitu pada Bank BCA pada tahun 2013 dan Bank BNI pada tahun 2014 (terdapat pada tabel 4.12), nilai maksimum sebesar 43,99% yaitu pada Bank Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2016 (terdapat pada tabel 4.12). *Mean* dari Bank Umum Syariah adalah sebesar 5,85%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai *mean* dari Bank Umum Konvensional yaitu sebesar 2,26% lebih rendah dibandingkan dengan nilai *mean* Bank Umum Syariah sebesar 5,85%.

Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio NPL/NPF lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Syariah, karena menurut teori semakin rendah rasio NPL/NPF maka semakin rendah tingkat kredit atau pembiayaan bermasalah yang disalurkan. Sehingga dalam proses penyeleksian calon peminjam dana, Bank Umum Syariah masih kurang baik dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional. Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia standar NPL/NPF yang baik adalah dibawah 5%, maka rasio NPF dari Bank Umum Syariah masih belum berada di kategori yang baik karena masih berada diatas 5%, sedangkan rasio NPL Bank Umum Konvensional sudah masuk dalam kategori yang baik karena sudah berada dibawah 5%.

E. Hasil Uji *Independent Sample t-test*

Tabel 4.14 Hasil Statistik Uji *Independent Sample t-test*

Rasio	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	
LDR/FDR	<i>Equal Variances Assumed</i>	2,280	0,135	-4,550	78	0,000
	<i>Equal Variances not Assumed</i>			-4,550	60,498	0,000
CAR	<i>Equal Variances Assumed</i>	23,535	0,000	-1,890	78	0,063
	<i>Equal Variances not Assumed</i>			-1,890	44,235	0,065
ROA	<i>Equal Variances Assumed</i>	3,922	0,51	3,317	78	0,001
	<i>Equal Variances not Assumed</i>			3,317	45,271	0,002
ROE	<i>Equal Variances Assumed</i>	2,187	0,143	5,984	78	0,000
	<i>Equal Variances not Assumed</i>			5,984	58,397	0,000
BOPO	<i>Equal Variances Assumed</i>	3,488	0,66	-4,522	78	0,000
	<i>Equal Variances not Assumed</i>			-4,522	53,836	0,000
NPL/NPF	<i>Equal Variances Assumed</i>	9,469	0,003	-2,655	78	0,10
	<i>Equal Variances not Assumed</i>			-2,655	40,356	0,11

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah selama periode 2013 – 2016 dengan menggunakan uji *independent sample t-test*, maka diperoleh hasil perbandingan kinerja keuangan antara kedua bank tersebut yang terdapat pada tabel 4.14 yang nantinya akan digunakan sebagai pengujian hipotesis yang telah dibuat. Hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian ini adalah:

H: Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah.

1. LDR/FDR (*Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio*)

Tabel 4.15 Hasil Uji *Independent Sample t-test* Rasio LDR/FDR

Rasio	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	
LDR/FDR	Equal Variances Assumed	2,280	0,135	-4,550	78	0,000
	Equal Variances not Assumed			-4,550	60,498	0,000

Berdasarkan hasil statistik yang terdapat pada tabel 4.15, dapat terlihat bahwa F hitung untuk rasio LDR/FDR adalah sebesar 2,280 dengan probabilitas 0,135. Karena probabilitas diatas $> 0,05$ maka dasar yang digunakan adalah *Equal Variances Assumed* (kedua varians sama). Maka t hitung dari rasio LDR/FDR adalah sebesar -4,550 dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena probabilitas $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah apabila dilihat berdasarkan rasio LDR/FDR.

Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah terbukti kebenarannya. Berdasarkan data empiris yang terdapat pada tabel 4.13 dapat dilihat juga bahwa kinerja keuangan kedua bank tersebut selama periode 2013 – 2016 berdasarkan rasio LDR/FDR lebih baik kinerja Bank Umum Konvensional dibandingkan dengan Bank Umum Syariah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa *mean* FDR Bank Umum Syariah sebesar 98,01% lebih tinggi dari *mean* LDR Bank Umum Konvensional dan *mean* Bank Umum Syariah belum memenuhi standar yang ada yaitu 78% - 92%, sedangkan *mean* Bank Umum Konvensional sebesar 82,72% sudah memenuhi standar yang ada.

2. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Tabel 4.16 Hasil Uji *Independent Sample t-test* Rasio CAR

Rasio	<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>		<i>t-test for Equality of Means</i>			
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	
CAR	<i>Equal Variances Assumed</i>	23,535	0,000	-1,890	78	0,063
	<i>Equal Variances not Assumed</i>			-1,890	44,235	0,065

Berdasarkan tabel 4.16 terlihat bahwa F hitung untuk rasio CAR adalah sebesar 23,535 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas tersebut < 0,05 maka dasar yang digunakan adalah *Equal Variances not Assumed* (kedua varians tidak sama). Maka t hitung pada rasio CAR adalah -1,890 dengan probabilitas sebesar 0,065. Oleh karena probabilitas tersebut > 0,05 maka

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio CAR.

Maka berdasarkan hasil statistik yang terdapat pada tabel 4.16, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio CAR tidak terbukti kebenarannya. Apabila dilihat dari data empiris yang terdapat pada tabel 4.13 berdasarkan hasil *mean* pada rasio CAR selama periode 2013 – 2016, kinerja keuangan Bank Umum Syariah lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional, karena *mean* dari Bank Umum Syariah yaitu 22,51% lebih tinggi dari *mean* Bank Umum Konvensional yaitu sebesar 18,36%.

3. ROA (*Return on Assets*)

Tabel 4.17 Hasil Uji *Independent Sample t-test* Rasio ROA

Rasio	<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>		<i>t-test for Equality of Means</i>		
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
ROA <i>Equal Variances Assumed</i>	3,922	0,51	3,317	78	0,001
<i>Equal Variances not Assumed</i>			3,317	45,271	0,002

Berdasarkan hasil statistik yang terdapat tabel 4.17, F hitung pada rasio ROA adalah sebesar 3,922 dengan probabilitas sebesar 0,51. Karena probabilitas tersebut $> 0,05$ maka dasar yang digunakan adalah *Equal Variances Assumed* (kedua varians sama). Maka t hitung pada rasio ROA adalah 3,317 dengan probabilitas sebesar 0,001. Oleh karena probabilitas $<$

0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio ROA.

Maka berdasarkan hasil statistik yang terdapat pada tabel 4.17, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil *mean* yang diperoleh rasio ROA yang terdapat pada hasil statistik tabel 4.13, dapat dikatakan bahwa selama periode 2013 – 2016 kinerja keuangan Bank Umum Konvensional lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Syariah karena *mean* dari Bank Umum Konvensional sebesar 2,56% lebih tinggi dari *mean* Bank Umum Syariah yang hanya sebesar 0,15%.

4. ROE (*Return on Equity*)

Tabel 4.18 Hasil Uji *Independent Sample t-test* Rasio ROE

Rasio	<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>		<i>t-test for Equality of Means</i>		
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
ROE					
<i>Equal Variances Assumed</i>	2,187	0,143	5,984	78	0,000
<i>Equal Variances not Assumed</i>			5,984	58,397	0,000

Berdasarkan tabel 4.18 diketahui F hitung pada rasio ROE adalah sebesar 2,187 dengan probabilitas 0,143. Karena probabilitas tersebut $> 0,05$ maka dasar yang digunakan adalah *Equal Variances Assumed* (kedua varians sama). Maka t hitung pada rasio ROE adalah sebesar 5,984 dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena probabilitasnya $< 0,05$ dapat disimpulkan bahwa

terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio ROE.

Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel 4.18, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah terbukti kebenarannya. Berdasarkan data empiris yang terdapat pada tabel 4.13 apabila ditinjau dari hasil *mean* yang diperoleh pada rasio ROE, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pada Bank Umum Konvensional selama periode 2013 – 2016 lebih baik dari Bank Umum Syariah karena *mean* Bank Umum Konvensional sebesar 18,15% lebih tinggi dari *mean* Bank Umum Syariah yang sebesar 2,51%.

5. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Tabel 4.19 Hasil Uji *Independent Sample t-test* Rasio BOPO

Rasio	<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>		<i>t-test for Equality of Means</i>			
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	
BOPO	<i>Equal Variances Assumed</i>	3,488	0,66	-4,522	78	0,000
	<i>Equal Variances not Assumed</i>			-4,522	53,836	0,000

Berdasarkan hasil pada tabel 4.19 diketahui F hitung dari rasio BOPO adalah sebesar 3,488 dengan probabilitas sebesar 0,66. Oleh karena probabilitas tersebut $> 0,05$ maka dasar yang digunakan adalah *Equal Variances Assumed* (kedua varians sama). Maka t hitung pada rasio BOPO adalah sebesar -4,522 dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena probabilitasnya $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan

yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio BOPO.

Berdasarkan hasil statistik yang terdapat pada tabel 4.19, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah terbukti kebenarannya. Berdasarkan data empiris yang terdapat pada tabel 4.13 apabila ditinjau dari hasil *mean* yang diperoleh pada rasio BOPO, maka dapat dikatakan bahwa selama periode 2013 – 2016 kinerja keuangan Bank Umum Konvensional lebih baik dari Bank Umum Syariah. Karena *mean* pada Bank Umum Konvensional sebesar 78,26% lebih rendah dari *mean* Bank Umum Syariah yaitu sebesar 96,96%.

6. NPL/NPF (*Non Performing Loan/Non Performing Financing*)

Tabel 4.20 Hasil Uji *Independent Sample t-test* Rasio NPL/NPF

Rasio	<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>		<i>t-test for Equality of Means</i>		
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
NPL/NPF <i>Equal Variances Assumed</i>	9,469	0,003	-2,655	78	0,10
<i>Equal Variances not Assumed</i>			-2,655	40,356	0,11

Berdasarkan hasil pada tabel 4.20 F hitung pada rasio NPL/NPF adalah sebesar 9,469 dengan probabilitas 0,003. Oleh karena probabilitasnya $< 0,05$ maka dasar yang digunakan adalah *Equal Variances not Assumed* (kedua varians tidak sama). Maka t hitung pada rasio ROE adalah sebesar -2,655 dengan probabilitas sebesar 0,11. Oleh karena probabilitas tersebut $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan

antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio NPL/NPF.

Berdasarkan hasil statistik yang terdapat pada tabel 4.20, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah tidak terbukti kebenarannya. Apabila ditinjau dari hasil *mean* yang diperoleh pada rasio NPL/NPF yang terdapat pada tabel 4.13, maka selama periode 2013 – 2016 dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Bank Umum Konvensional lebih baik dari Bank Umum Syariah karena *mean* dari Bank Umum Konvensional yaitu sebesar 2,26% lebih rendah dari *mean* Bank Umum Syariah yaitu sebesar 5,85%.

F. Pembahasan

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang terdapat pada tabel 4.13, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Konvensional memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio LDR/FDR, ROA, ROE, BOPO dan NPL/NPF. Hal tersebut dikarenakan pada rasio LDR, Bank Umum Konvensional memiliki *mean* yang sesuai dengan standar dari BI, sedangkan *mean* Bank Umum Syariah berada di atas standar yang ada. Maka Bank Umum Konvensional memiliki tingkat likuidasi yang lebih baik, sehingga Bank Umum Konvensional memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi permintaan kredit yang diajukan oleh nasabah.

Pada rasio ROA, Bank Umum Konvensional memiliki *mean* yang tinggi dari Bank Umum Syariah, karena menurut teori semakin tinggi rasio ROA mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh dan semakin baik bank tersebut dalam menggunakan asetnya guna menghasilkan keuntungan. Maka Bank Umum Konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dalam penggunaan dan pengelolaan aset yang dimiliki guna menghasilkan keuntungan bagi bank.

Pada rasio ROE Bank Umum Konvensional memiliki *mean* yang lebih tinggi dari Bank Umum Syariah. Menurut teori, semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik bank tersebut dalam menghasilkan laba atas ekuitas yang dimiliki dan nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ikut meningkat. Maka Bank Umum Konvensional memiliki kinerja yang lebih baik karena kemampuannya dalam mengelola modal atau ekuitas yang dimiliki dalam menghasilkan laba bagi bank.

Pada rasio BOPO Bank Umum Konvensional memiliki *mean* yang lebih rendah dari Bank Umum Syariah, karena menurut teori semakin rendah rasio BOPO mencerminkan semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Maka Bank Umum Konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan laba dengan meningkatkan pendapatan operasionalnya dan menekan biaya-biaya operasionalnya.

Pada rasio NPL/NPF Bank Umum Konvensional memiliki *mean* yang lebih rendah dari Bank Umum Syariah, karena menurut teori apabila rasio NPL/NPF tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi tidak sehat

akibat adanya kredit/pembiayaan bermasalah yang dapat menyebabkan laba yang diterima oleh bank akan menurun. Maka Bank Umum Konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dalam meminimalisir resiko kredit bermasalah, dimana kredit bermasalah tersebut dapat mengakibatkan bank kekurangan dana akibat tidak adanya pemasukan atas kredit yang telah disalurkan dan hal tersebut dapat menghambat kegiatan usaha bank.

Sedangkan Bank Umum Syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio CAR. Pada rasio CAR Bank Umum Syariah memiliki *mean* yang lebih tinggi dari Bank Umum Konvensional, karena menurut teori semakin besar nilai rasio CAR maka mencerminkan kemampuan bank yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian. Maka Bank Umum Syariah memiliki kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan modal yang dimiliki guna menghadapi kemungkinan resiko kerugian yang dapat diakibatkan oleh adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Sovia, 2016) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Bank Umum Konvensional lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio ROA, ROE, BOPO dan NPL/NPF. Dan penelitian (Wahyuni dan Efriza, 2107) yang menyatakan kinerja keuangan Bank Umum Syariah pada rasio CAR lebih dari Bank Umum Konvensional. Tetapi tidak didukung oleh penelitian (Ningsih, 2012) yang menyatakan Bank Umum Syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik berdasarkan rasio LDR/FDR dan ROA.

2. Hasil Uji *Independent Sample t-test*

Berdasarkan hasil uji *independent sample t-test* yang telah dijelaskan pada tabel 4.14 maka dapat disimpulkan bahwa antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan rasio LDR/FDR, ROA, ROE dan BOPO. Sedangkan berdasarkan rasio CAR dan NPL/NPF menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

Hasil tidak signifikan tersebut dapat dikarenakan oleh hasil rata-rata (*mean*) yang terdapat pada tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa hasil rata-rata rasio CAR pada Bank Umum Konvensional sebesar 16,39% (tahun 2013), sebesar 17,08% (tahun 2014), sebesar 18,83% (tahun 2015), sebesar 21,16% (tahun 2016) dan hasil rata-rata rasio CAR pada Bank Umum Syariah yang terdapat pada tabel 4.8 sebesar 24,10% (tahun 2013), sebesar 21,97% (tahun 2014), sebesar 20,46% (tahun 2015) dan sebesar 23,52% (tahun 2016).

Serta hasil rata-rata (*mean*) yang terdapat pada tabel 4.6 yang menunjukkan bahwa hasil rata-rata rasio NPL pada Bank Umum Konvensional sebesar 1,65% (tahun 2013), sebesar 2,16% (tahun 2014), sebesar 2,51% (tahun 2015), sebesar 2,73% (tahun 2016) dan hasil rata-rata rasio NPF pada Bank Umum Syariah yang terdapat pada tabel 4.12 sebesar 2,88 (tahun 2013), sebesar 4,59% (tahun 2014), sebesar 7,45% (tahun 2015) dan sebesar 9,00% (tahun 2016). Dari hasil rata-rata kedua bank pada rasio

CAR dan NPL/NPF tidak terlalu jauh berbeda sehingga tidak terlalu terlihat perbedaan kinerja antara kedua bank tersebut.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Sovia, 2016) dan (Wahyuni dan Efriza, 2017) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio LDR/FDR, ROA, ROE, BOPO dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR dan NPL/NPF. Tetapi tidak didukung oleh penelitian (Ningsih, 2012) yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio CAR dan NPL/NPF.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil analisis data yang dilakukan pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio keuangan bank selama periode 2013 – 2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil rata-rata (*mean*) dari masing-masing rasio yang terdapat pada hasil analisis statistik deskriptif yang telah dikemukakan pada Bab IV, menunjukkan bahwa Bank Umum Konvensional memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio LDR/FDR, ROA, ROE, BOPO, dan NPL/NPF. Sedangkan Bank Umum Syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan Bank Umum Konvensional berdasarkan rasio CAR.
2. Berdasarkan hasil uji *independent sample t-test* yang telah dikemukakan pada Bab IV, menunjukkan bahwa kinerja keuangan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah iya terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan rasio LDR/FDR, ROA, ROE, dan BOPO. Sedangkan berdasarkan rasio CAR dan NPL/NPF menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan pada penelitian ini, maka adapun sarang yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Konvensional

Bank Umum Konvensional diharapkan dapat terus menjaga kestabilan dan lebih meningkatkan kinerjanya lagi dari masing-masing rasio yang dimiliki agar dapat membuat perusahaan terus berkembang dan selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya nasabah yang telah menggunakan jasa-jasa serta produk-produk dari Bank Umum Konvensional tersebut.

2. Bagi Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah diharapkan melakukan peningkatan atas kinerjanya pada masing-masing rasio yang dimiliki agar Bank Umum Syariah dapat terus berkembang dan dapat terus bersaing di Industri Perbankan, serta terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Oleh karena penelitian ini hanya menggunakan enam rasio untuk mengukur kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah dalam penelitian ini, maka bagi peneliti selanjutnya dapat menambah rasio-rasio lainnya untuk mengukur kinerjanya dan dapat juga menambah sampelnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Drs. Ismail, MBA., Ak. 2011. *Perbankan Syariah*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi 12. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Sulhan dan Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. UIN-Malang Press. Malang.
- Munawir S. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Totok Budisantoso dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.

Publikasi Ilmiah

- Anggraini. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional (Periode 2002-2011)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 dari www.repository.unhas.ac.id.
- Jahja, Adi Susilo dan Muhammad Iqbal. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*. Jurnal Institut Perbanas Jakarta, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 dari www.jurnal.perbanasinstitute.ac.id.

- Ningsih, Widya Wahyu. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 dari www.repository.unhas.ac.id.
- Ningtyas, Candra Puspita. 2013. *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah berdasarkan Analisis Rasio Keuangan (Studi pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk)*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Sovia, Sasa Elida. 2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio keuangan Bank (Studi pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI yang memiliki Bank Syariah Periode 2012-2014)*. Skripsi Fakultas Ilmu Adiministrasi Universitas Brawijaya.
- Suwandi, Jordi. 2017. *Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan LDR terhadap ROA pada BUSN Devisa*. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. Volume 6 Nomor 7 2017, diakses pada tanggal 5 November 2017 dari www.ejournal.stiesia.ac.id
- Marbelanty, Fivtina. 2015. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Perbankan Konvensional dengan Perbankan Syariah di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 dari www.digilib.undip.ac.id
- Umardani, Dwi dan Abraham Muchlish. 2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa. Vol. 9 No.1 2016, diakses pada 5 November 2017 dari www.jurnal.stier.ac.id
- Wahyuni, Molli dan Ririn Eka Efriza. 2017. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia, International Journal of Social and Business*. Vol. 1 (2) pp. 66-74, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 dari www.ejournal.undiksha.ac.id

Peraturan dan Undang-Undang (UU)

2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
2017. *Booklet Perbankan Indonesia 2017*. Jakarta : Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (Bank Indonesia).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013*.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP Tanggal 16 Desember 2011.

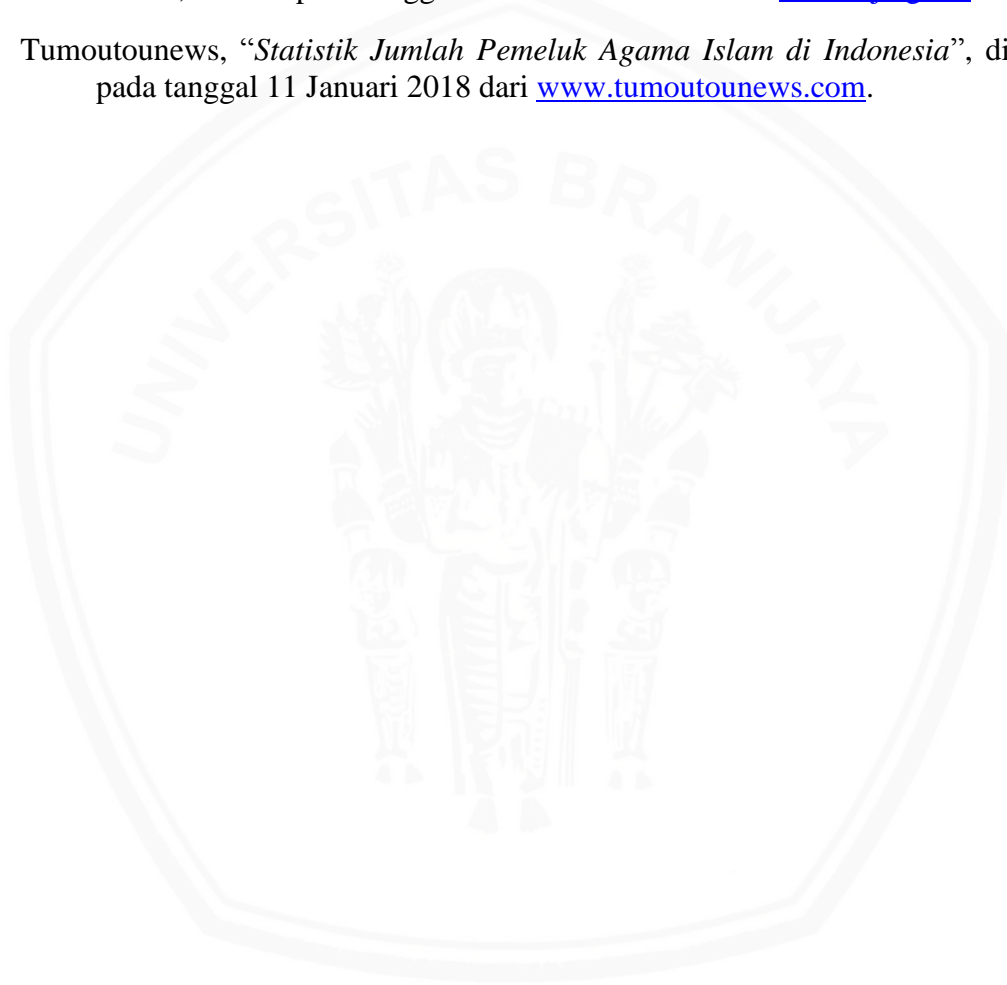
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/4/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang *Kualitas Aktiva Produktif*.

Website

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “*Laporan Publikasi Keuangan Perbankan*”, diakses pada tanggal 15 Februari 2017 dari www.ojk.go.id.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “*Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II 2017*”, diakses pada tanggal 19 November 2017 dari www.ojk.go.id.

Tumoutounews, “*Statistik Jumlah Pemeluk Agama Islam di Indonesia*”, diakses pada tanggal 11 Januari 2018 dari www.tumoutounews.com.





LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil *Purposive Sampling* Bank Konvensional

No.	Nama Bank	Kriteria		
		1	2	3
1.	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	v	v	v
2.	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	v	v	v
3.	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	v	v	v
4.	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	v		
5.	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	v		
6.	PT. Bank Permata, Tbk	v		
7.	PT. Bank Central Asia, Tbk	v	v	v
8.	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	v	v	v
9.	PT. PAN Indonesia Bank, Tbk	v	v	
10.	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	v		
11.	PT. Bank OCBC NISP, Tbk	v		
12.	PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk	v		
13.	PT. Bank Bumi Arta, Tbk	v		
14.	PT. Bank HSBC Indonesia	v		
15.	PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk	v		
16.	PT. Bank Mayapada International, Tbk	v		
17.	PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk	v		
18.	PT. Bank Of India Indonesia, Tbk	v		
19.	PT. Bank Mestika Dharma, Tbk	v		
20.	PT. Bank Shinhan Indonesia	v		
21.	PT. Bank Sinarmas, Tbk	v		
22.	PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk	v		
23.	PT. Bank Ganesha	v		
24.	PT. Bank ICBC Indonesia	v		
25.	PT. Bank QNB Indonesia, Tbk	v		
26.	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	v		
27.	PT. Bank Mega, Tbk	v	v	v

No.	Nama Bank	Kriteria		
		1	2	3
28.	PT. Bank Bukopin, Tbk	v	v	v
29.	PT. Bank Kebhana Indonesia	v		
30.	PT. Bank MNC Internasional, Tbk	v		
31.	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	v		
32.	PT. Bank SBI Indonesia	v		
33.	PT. Bank Index Selindo	v		
34.	PT. Bank Mayora	v		
35.	PT. Bank China Contruction Bank Indonesia, Tbk	v		
36.	PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	v		
37.	PT. Bank Resona Perdana	v		
38.	PT. Bank Mizuho Indonesia	v		
39.	PT. Bank Capital Indonesia, Tbk	v		
40.	PT. Bank BNP Paribas Indonesia	v		
41.	PT. Bank Anz Indonesia	v		
42.	PT. Bank Rabobank International Indonesia	v		
43.	PT. Bank Agris, Tbk	v		
44.	PT. Bank CTBC Indonesia	v		
45.	PT. Bank Commonwealth	v		
46.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	v	v	v
47.	PT. Bank Bisnis Internasional	v		
48.	PT. Bank Oke Indonesia	v		
49.	PT. Bank Jasa Jakarta	v		
50.	PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk	v		
51.	PT. Bank Mitraniaga, Tbk	v		

No.	Nama Bank	Kriteria		
		1	2	3
52.	PT. Bank Royal Indonesia	v		
53.	PT. Bank Nationalnobu, Tbk	v		
54.	PT. Bank INA Perdana, Tbk	v		
55.	PT. Prima Master Bank	v		
56.	PT. Bank Sahabat Sampoerna	v		
57.	PT. Bank Dinar Indonesia, Tbk	v		
58.	PT. Bank Amar Indonesia	v		
59.	PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi	v		
60.	PT. Bank Arthos Indonesia	v		
61.	PT. Bank Multiarta Sentosa	v		
62.	PT. Bank Fama Internasional	v		
63.	PT. Bank Mandiri Taspen	v		
64.	PT. Bank Victoria International, Tbk	v	v	v
65.	PT. Bank Harda International	v		
66.	PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	v	v	v
67.	PT. BPD DKI	v		
68.	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	v		
69.	PT. BPD Jawa Tengah	v		
70.	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	v		
71.	PT. BPD Jambi	v		
72.	PT. BPD Sumatera	v		
73.	PT. BPD Sumatera Barat	v		
74.	PT. BPD Riau Kepri	v		
75.	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	v		
76.	PT. BPD Lampung	v		
77.	PT. BPD Kalimantan Selatan	v		
78.	PT. BPD Kalimantan Barat	v		
79.	PD. BPD Kaltim dan Kalimantan Utar	v		

No.	Nama Bank	Kriteria		
		1	2	3
80.	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	v		
81.	PT. BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	v		
82.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat	v		
83.	PT. BPD Bali	v		
84.	PT. BPD Nusa Tenggara Timur	v		
85.	PT. BPD Maluku dan Maluku Utara	v		
86.	PT. BPD Papua	v		
87.	PT. BPD Bengkulu	v		
88.	PT. BPD Sulawesi Tengah	v		
89.	PT. BPD Sulawesi Tenggara	v		
90.	PT. BPD Banten, Tbk	v		
91.	CitiBank, N.A.	v		
92.	JP Morghan Chase Bank, NA	v		
93.	Bank Of America, N.A	v		
94.	Bangkok Bank PCL	v		
95.	The Hongkong & Shanghai B.C, LTD	v		
96.	The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD.	v		
97.	Standard Chartered Bank	v		
98.	Deutsche Bank AG	v		
99.	Bank Of China (Hong Kong) Limited	v		

Lampiran 2 Hasil Purposive Sampling Bank Syariah

No.	Nama Bank	Kriteria		
		1	2	3
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	v		
2.	PT. Bank Aceh Syariah	v		
3.	PT. Bank Victoria Syariah	v	v	v
4.	PT. Bank BRI Syariah	v	v	v
5.	PT. B.P.D Jawa Barat dan Banten Syariah	v	v	v
6.	PT. Bank BNI Syariah	v	v	v
7.	PT. Bank Syariah Mandiri	v	v	v
8.	PT. Bank Syariah Mega Indonesia	v	v	v
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	v	v	
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	v	v	v
11.	PT. Bank BCA Syariah	v	v	v
12.	PT. Maybank Syariah Indonesia	v	v	v
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	v	v	v

Lampiran 3 Data Mentah Bank Umum Konvensional

Nama Bank	Tahun	LDR/ FDR	CAR	ROA	ROE	BOPO	NPL/ NPF
Bank BRI	2013	88,54	16,99	5,03	34,11	60,58	1,55
Bank Mandiri	2013	82,97	14,93	3,66	27,31	62,4	1,6
Bank BNI	2013	85,3	15,1	3,4	22,5	67,1	2,2
Bank BCA	2013	75,4	15,7	3,8	28,2	61,5	0,4
Bank Maybank	2013	87,04	12,74	1,64	16,42	83,06	2,11
Bank Mega	2013	57,41	15,74	1,14	9,65	89,76	2,18
Bank Bukopin	2013	85,8	15,12	1,78	19,44	82,38	2,25
Bank BTPN	2013	88	23,1	4,5	26,2	75	0,67
Bank Victoria	2013	73,39	17,95	1,97	16,72	81,35	0,7
Bank BJB	2013	96,47	16,51	2,61	26,76	79,41	2,83
Bank BRI	2014	81,68	18,31	4,73	31,19	65,42	1,69
Bank Mandiri	2014	82,02	16,6	3,57	25,81	64,98	1,66
Bank BNI	2014	87,8	16,2	3,5	23,6	69,8	2
Bank BCA	2014	76,8	16,9	3,9	25,5	62,4	0,6
Bank Maybank	2014	92,67	15,76	0,69	6,1	92,13	2,23
Bank Mega	2014	65,85	15,23	1,16	10,05	91,25	2,29
Bank Bukopin	2014	83,89	14,21	1,23	11,53	89,21	2,78
Bank BTPN	2014	97	23,2	3,6	18,6	80	0,7
Bank Victoria	2014	70,25	18,35	0,8	7,62	93,25	3,52
Bank BJB	2014	93,18	16,08	1,92	18,92	85,6	4,15
Bank BRI	2015	86,88	20,59	4,19	29,89	67,96	2,02
Bank Mandiri	2015	87,05	18,6	3,15	23,03	69,67	2,29
Bank BNI	2015	87,8	19,5	2,6	17,2	75,5	2,7
Bank BCA	2015	81,1	18,7	3,8	21,9	63,2	0,7
Bank Maybank	2015	86,14	15,17	1,08	8,47	89,18	3,67
Bank Mega	2015	65,05	22,85	1,97	15,2	85,72	2,81
Bank Bukopin	2015	86,34	13,56	1,39	14,8	87,56	2,83
Bank BTPN	2015	97	23,8	3,1	14,1	82	0,7

Nama Bank	Tahun	LDR/ FDR	CAR	ROA	ROE	BOPO	NPL/ NPF
Bank Victoria	2015	70,17	19,3	0,65	6,73	93,89	4,48
Bank BJB	2015	88,13	16,21	2,04	23,05	83,31	2,91
Bank BRI	2016	87,77	22,91	3,84	23,08	68,93	2,03
Bank Mandiri	2016	85,86	21,36	1,9	11,12	80,94	3,96
Bank BNI	2016	90,4	19,4	2,7	15,5	73,6	3
Bank BCA	2016	77,1	21,9	4	20,5	60,4	1,3
Bank Maybank	2016	88,92	16,77	1,6	11,85	84,36	3,42
Bank Mega	2016	55,35	26,21	2,36	10,91	81,81	3,44
Bank Bukopin	2016	86,04	15,03	1,38	13,19	86,97	3,77
Bank BTPN	2016	95	25	3,1	12,6	82	0,79
Bank Victoria	2016	68,38	24,58	0,52	4,79	944,3	3,89
Bank BJB	2016	86,7	18,43	2,22	21,81	82,7	1,69

Lampiran 4 Data Mentah Bank Umum Syariah

Nama Bank	Tahun	LDR/ FDR	CAR	ROA	ROE	BOPO	NPL/ NPF
Bank BRI Syariah	2013	102,7	14,49	1,15	10,2	90,42	1,86
Bank Syariah Mandiri	2013	89,37	14,1	1,53	15,34	73,34	4,32
Bank BNI Syariah	2013	97,86	11,42	1,37	9,65	88,11	4,06
Bank BCA Syariah	2013	83,5	22,4	1	4,3	90,2	0,1
Bank Maybank Syariah	2013	152,87	59,41	2,87	5,05	67,79	2,69
Bank Syariah Mega	2013	93,37	12,99	2,33	26,23	86,03	2,98
Bank Syariah Bukopin	2013	100,29	11,1	0,69	7,63	92,29	4,27
Bank BTPN Syariah	2013	149,87	58,67	0,11	0,1	98,87	2,94
Bank Victoria Syariah	2013	84,65	18,4	0,5	3,7	91,95	3,71
Bank BJB Syariah	2013	97,4	17,99	0,91	4,65	85,76	1,86
Bank BRI Syariah	2014	93,9	12,89	0,08	0,44	99,77	6,84
Bank Syariah Mandiri	2014	82,13	14,12	-0,04	-0,94	85,1	4,6
Bank BNI Syariah	2014	92,6	12	1,27	10,83	89,8	0,1
Bank BCA Syariah	2014	91,2	29,6	0,8	2,9	92,9	5,04
Bank Maybank Syariah	2014	157,77	52,13	3,61	6,83	69,62	3,89
Bank Syariah Mega	2014	93,61	19,26	0,29	2,5	97,61	4,07
Bank Syariah Bukopin	2014	92,89	14,8	0,27	2,39	96,77	1,29
Bank BTPN Syariah	2014	93,97	33,88	4,23	13,75	85,92	7,1
Bank Victoria Syariah	2014	95,19	15,27	-1,87	-17,61	143,31	7,1
Bank BJB Syariah	2014	84,02	15,78	0,72	3,73	91,01	5,84
Bank BRI Syariah	2015	84,16	13,94	0,77	6,33	93,79	2,53

Nama Bank	Tahun	LDR/ FDR	CAR	ROA	ROE	BOPO	NPL/ NPF
Bank Syariah Mandiri	2015	81,99	12,85	0,56	5,92	79,46	6,06
Bank BNI Syariah	2015	91,94	11,47	1,43	11,39	89,63	4,86
Bank BCA Syariah	2015	91,4	34,3	1	3,1	92,5	0,7
Bank Maybank Syariah	2015	110,54	38,4	-20,13	-32,04	192,6	35,15
Bank Syariah Mega	2015	98,49	18,74	0,3	1,61	99,51	4,26
Bank Syariah Bukopin	2015	90,56	16,31	0,79	5,35	91,99	2,99
Bank BTPN Syariah	2015	96,54	19,93	5,24	17,89	85,82	1,25
Bank Victoria Syariah	2015	95,29	16,14	-2,36	-15,06	119,19	9,8
Bank BJB Syariah	2015	104,75	22,53	0,25	0,92	98,78	6,93
Bank BRI Syariah	2016	81,42	20,63	0,95	7,4	91,33	2,94
Bank Syariah Mandiri	2016	79,19	14,01	0,59	5,81	78	4,92
Bank BNI Syariah	2016	84,57	10,27	1,44	11,94	87,67	4,47
Bank BCA Syariah	2016	90,1	36,7	1,1	3,5	92,2	0,5
Bank Maybank Syariah	2016	134,73	55,06	-9,51	-27,62	160,28	43,99
Bank Syariah Mega	2016	95,24	23,53	2,63	11,97	88,16	3,3
Bank Syariah Bukopin	2016	88,18	17	0,76	5,15	91,76	3,17
Bank BTPN Syariah	2016	92,75	23,8	8,98	31,71	75,14	1,53
Bank Victoria Syariah	2016	100,67	15,98	-2,19	-17,45	131,34	7,31
Bank BJB Syariah	2016	98,73	18,25	-8,09	-49,05	122,77	17,91

Lampiran 5 Rasio Keuangan Bank Mandiri

Description ((in million Rupiah))	2016	2015	2014	2013	2012
FINANCIAL RATIOS (BANK ONLY)					
Capital					
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21.36%	18.60%	16.60%	14.93%	15.48%
Productive Assets					
Productive & Non-Productive Assets to total productive assets & non-productive assets	2.47%	1.56%	1.15%	1.17%	1.17%
Non-performing productive assets to total productive assets	3.07%	1.96%	1.42%	1.43%	1.45%
Financial asset CKPN to productive assets	3.97%	3.10%	2.61%	2.86%	2.77%
Non-Performing Loans (Gross NPL)	3.96%	2.29%	1.66%	1.60%	1.74%
net NPL	1.38%	0.60%	0.44%	0.37%	0.37%
Profitability					
ROA	1.95%	3.15%	3.57%	3.66%	3.55%
ROE	11.12%	23.03%	25.81%	27.31%	27.23%
NIM	6.29%	5.90%	5.94%	5.68%	5.58%
BOPO	80.94%	69.67%	64.98%	62.41%	63.93%
Liquidity					
LDR	85.86%	87.05%	82.02%	82.97%	77.66%
Compliance					
Percentage of Violation to BMPK					
Related Parties	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Non-Related Parties	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Percentage of violation to BMPK					
Related Parties	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Non-Related Parties	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Minimum Rupiah Demand Deposits	6.50%	7.50%	8.00%	8.00%	8.00%
Minimum demand deposits in foreign Currencies	8.12%	8.50%	8.49%	8.10%	8.01%
Net Exchange Position	2.98%	2.91%	2.01%	2.40%	1.27%

Sumber: www.bankmandiri.co.id

Lampiran 6 Rasio Keuangan Bank Syariah Mandiri

C.	Laporan Rasio-Rasio Keuangan Penting	2012	2013	2014*	2015	2016	Pertumbuhan 2016.2015 (%)
1	Pemenuhan Modal Minimum (CAR)	13,82%	14,10%	14,12%	12,85%	14,01%	9,01
2	Imbal Hasil Rata-Rata Aset (ROA) - Sebelum Pajak	2,25%	1,53%	-0,04%	0,56%	0,59%	6,27
3	Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (ROE) - Setelah Pajak	25,05%	15,34%	-0,94%	5,92%	5,81%	(1,86)
4	Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	94,40%	89,37%	82,13%	81,99%	79,19%	(3,41)
5	Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF NETT)	1,14%	2,29%	4,29%	4,05%	3,13%	(22,56)
6	Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF GROSS)	2,82%	4,32%	6,84%	6,06%	4,92%	(18,78)
7	Pendapatan Bagi Hasil Bersih terhadap Aset Produktif (Net Imbalan)	7,25%	7,25%	6,20%	5,75%	6,16%	7,10
8	Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar	155,26%	178,65%	267,77%	202,69%	188,56%	(6,97)
9	Liabilitas terhadap Ekuitas (DER)	219,31%	226,85%	187,64%	176,05%	181,59%	3,14
10	Liabilitas terhadap Aset (DAR)	16,91%	17,24%	12,94%	14,04%	14,72%	4,84

*) Direklasifikasi dan disajikan kembali

Sumber: www.syariahmandiri.co.id

Lampiran 7 Rasio Keuangan Bank BNI

(Dalam Prosentase)

Komponen Modal	Desember 2016	Desember 2015
I. Rasio Kinerja		
1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	19.36	19.49
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2.05	1.91
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1.96	1.87
4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2.72	2.48
5. NPL gross	2.96	2.70
6. NPL net	0.44	0.91
7. Return on Asset (ROA)	2.69	2.64
8. Return on Equity (ROE)	15.54	17.21
9. Net Interest Margin (NIM)	6.17	6.42
10. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	73.59	75.48
11. Loan to Deposit Ratio (LDR)	90.41	87.77
II. Kepatuhan (Compliance)		
1. a. Persentase Pelanggaran BMPK		
i. Pihak terkait	0.00	0.00
ii. Pihak tidak terkait	0.00	0.00
b. Persentase Pelampauan BMPK		

(Dalam Prosentase)

Komponen Modal	Desember 2014	Desember 2013
I. Rasio Kinerja		
1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16.22	15.09
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1.45	1.53
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1.40	1.47
4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1.74	1.93
5. NPL gross	1.96	2.17
6. NPL net	0.39	0.55
7. Return on Asset (ROA)	3.49	3.36
8. Return on Equity (ROE)	23.64	22.47
9. Net Interest Margin (NIM)	6.20	6.11
10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	69.78	67.12
11. Loan to Deposit Ratio (LDR)	87.81	85.30
II. Kepatuhan (Compliance)		
1. a. Persentase Pelanggaran BMPK	0.00	0.00
i. Pihak terkait	0.00	0.00
ii. Pihak tidak terkait	0.00	0.00

Sumber: www.ojk.go.id

Lampiran 8 Rasio Keuangan Bank BNI Syariah

Pos-pos	Desember 2016	
	Desember 2016	Desember 2015
Rasio Kinerja		
1. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	14.92	15.48
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2.43	2.35
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2.44	2.23
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2.28	1.90
5. NPF gross	2.94	2.53
6. NPF net	1.64	1.46
7. Return On Assets (ROA)	1.44	1.43
8. Return On Equity (ROE)	11.94	11.39
9. Net Imbalan (NI)	8.32	8.25
10. Net Operating Margin (NOM)	0.90	0.67
11. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	87.67	89.63
12. Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	20.55	19.41
13. Financing to Deposit Ratio (FDR)	84.57	91.94
Kepatuhan (Compliance)		
1. a. Persentase Pelanggaran BMPD		
1. Pihak Terkait	0.00	0.00

Pos-pos	Desember 2014	
	Desember 2014	Desember 2013
I. Permodalan		
1. CAR (KPMM)		
a. Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Penyaluran Dana	18.76	16.54
b. Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Penyaluran Dana dan Risiko Pasar	18.42	16.23
2. Aktiva tetap terhadap modal	10.96	13.46
II. Aktiva Produktif		
1. Aktiva produktif bermasalah (NPA)	1.52	1.53
2. NPF		
a. Gross	1.86	1.86
b. Net	1.04	1.13
3. PPA produktif terhadap aktiva produktif	1.42	1.45
4. Pemenuhan PPA produktif	109.99	101.72
III. Rentabilitas		
1. ROA	1.27	1.37
2. ROE	13.98	11.73
3. NIM/NOI (Net Operational Income)	9.04	9.51
4. OER (Operational Efficiency Ratio) (BOPO)	85.03	83.94

Sumber: www.ojk.go.id

Lampiran 9 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics Bank Umum Konvensional

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LDR/FDR	40	55.35	97.00	82.7160	10.21828
CAR	40	12.74	26.21	18.3648	3.48958
ROA	40	.52	5.03	2.5568	1.25115
ROE	40	4.79	34.11	18.1513	7.58092
BOPO	40	60.40	94.30	78.2648	10.62294
NPL/NPF	40	.40	4.48	2.2578	1.11836
Valid N (listwise)	40				

Descriptive Statistics Bank Umum Syariah

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LDR/FDR	40	79.19	157.77	98.0100	18.64010
CAR	40	10.27	59.41	22.5135	13.43902
ROA	40	-20.13	8.98	.1583	4.39829
ROE	40	-49.05	31.71	2.5110	14.69009
BOPO	40	67.79	192.60	96.9623	23.89556
NPL/NPF	40	.10	43.99	5.8498	8.48211
Valid N (listwise)	40				

Lampiran 10 Hasil Uji *Independent Sample t-test*

	Levene's Test for Equality of Variance		t-test for Equality of Means						
	F	Sig	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
LDR/FDR Equal Variances Assumed	2,280	0,135	-4,550	78	0,000	-15,29400	3,36105	-21,98534	-8,60266
Equal Variances Not Assumed			-4,450	60,498	0,000	-15,29400	3,36105	-22,01596	-8,57204
CAR Equal Variances Assumed	23,535	0,000	-1,890	78	0,063	-4,14875	2,19536	-8,51938	0,22188
Equal Variances Not Assumed			-1,890	44,235	0,065	-4,14875	2,19536	-8,57255	0,27505
ROA Equal Variances Assumed	3,922	0,051	3,317	78	0,001	2,39850	0,72302	0,95908	3,83792
Equal Variances Not Assumed			3,317	45,271	0,002	2,39850	0,72302	0,94250	3,85450
ROE Equal Variances Assumed	2,187	0,143	5,984	78	0,000	15,64025	2,61376	10,43666	20,84384
Equal Variances Not Assumed			5,984	58,397	0,000	15,64025	2,61376	10,43666	20,87150
BOPO Equal Variances Assumed	3,488	0,66	-4,522	78	0,000	-18,69750	4,13474	-26,92914	-10,46586
Equal Variances Not Assumed			-4,522	53,836	0,000	-18,69750	4,13474	-26,98774	-10,40726
NPL/NPF Equal Variances Assumed	9,469	0,003	-2,655	78	0,010	-3,59200	1,35275	-6,28511	-0,89889
Equal Variances Not Assumed			-2,655	40,356	0,011	-3,59200	1,35275	-6,32525	-0,85875

Lampiran 11 *Curriculum Vitae*

CURRICULUM VITAE

I. IdentitasDiri

Nama : Duwi Hardianti
 Alamat *e-mail* : duwihardianti@gmail.com
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Oktober 1996
 Warga Negara : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Asrama POLRI Cipinang Bawah
 Blok J No. 9, Jakarta Timur



II. Pendidikan Formal

1. Fakultas Ilmu Administrasi, Universtias Brawijaya Malang (2014 – 2018)
2. SMA Negeri 36 Jakarta (2011 – 2014)
3. SMP Negeri 92 Jakarta (2008 – 2011)
4. SDN Jatinegara Kaum 01 Pagi Jakarta (2002 – 2008)

III. Pengalaman Kepanitiaan

1. Olimpiade Brawijaya sebagai Staff Lomba (2016)
2. Panitia PK2MABA FIA sebagai Mentor (2015)
3. FIA Night Run sebagai Staff Kesehatan (2015)

IV. PengalamanMagang

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Malang (17 Juli-16 September 2017)

V. Kemampuan

1. Bahasa Indonesia (Bahasa Nasional)
2. *Microsoft Office* (Skor *Good Grade TRUST Training Partners*)

Demikian *Curriculum Vitae* yang saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 14 Mei 2018

Duwi Hardianti

CURRICULUM VITAE

I. Identitas Diri

Nama : Duwi Hardianti
 Alamat *e-mail* : duwihardianti@gmail.com
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Oktober 1996
 Warga Negara : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Asrama POLRI Cipinang
 Bawah Blok JNo.9, Jakarta Timur



II. Pendidikan Formal

1. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang (2014 – 2018)
2. SMANegeri 36 Jakarta (2011 – 2014)
3. SMPNegeri 92 Jakarta (2008 – 2011)
4. SDN JatinegaraKaum 01 Pagi Jakarta (2002 – 2008)

III. Pengalaman Kepanitiaan

1. Olimpiade Brawijaya sebagai Staff Lomba (2016)
2. Panitia PK2 MABAFIA sebagai Mentor (2015)
3. FIA Night Run sebagai Staff Kesehatan (2015)

IV. Pengalaman Magang

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Malang (17 Juli-16 September 2017)

V. Kemampuan

1. Bahasa Indonesia (Bahasa Nasional)
2. *Microsoft Office* (Skor *Good Grade TRUST Training Partners*)

Demikian *Curriculum Vitae* yang saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 14 Mei 2018

Duwi Hardianti